

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**20  
24**



**PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG  
KELAS IA**



## KATA PENGANTAR



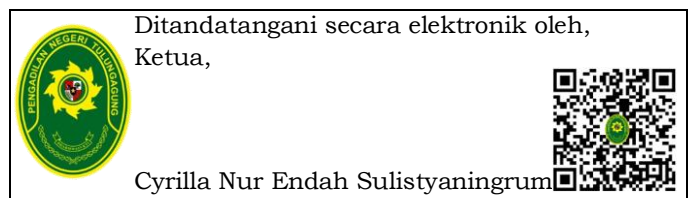
Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 di bidang administrasi umum maupun administrasi perkara maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari Pengadilan Negeri Tulungagung. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal

24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 9328/KPT.W14-U/OT1.6/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tugas tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Tulungagung telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memenuhi visi dan misinya. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini kami susun walaupun masih jauh dari sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat berguna sebagai laporan maupun sebagai evaluasi dikemudian hari.

Tulungagung, 15 Januari 2025





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Kebijakan Umum Peradilan	1
1.2 Visi, Misi, dan Motto	11
1.3 Wilayah Yurisdiksi	12
1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi	13
<b>BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	
2.1 Keadaan Perkara di Peradilan Umum	14
2.2 Penyelesaian Perkara	15
- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	16
- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	16
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK	17
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi	17
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	17
2.3 Program Prioritas Nasional	17
- Posbakum	18
- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	19
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	19
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA</b>	
3.1 Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan	22
3.2 Mutasi	23
3.3 Promosi	24
3.4 Pensiun	25
3.5 Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)	25
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	
4.1 Pengelolaan Keuangan	28
4.2 Pengelolaan Sarana Prasarana	33
4.3 Pengelolaan Teknologi Informasi	38
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
5.1 Akreditasi Penjaminan Mutu	49
5.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	50
5.3 Inovasi Pelayanan Publik	56
<b>BAB VI PENGAWASAN</b>	
6.1 Internal	66
6.2 Evaluasi	67
<b>BAB VII PENUTUP</b>	
7.1 Kesimpulan	68
7.2 Rekomendasi	69



## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	14
Tabel	2.2	Keadaan Perkara Banding Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	14
Tabel	2.3	Keadaan Perkara Kasasi Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	15
Tabel	2.4	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	15
Tabel	2.5	Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	15
Tabel	2.6	Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	16
Tabel	2.7	Sisa Perkara Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tulungagung yang Diputus Tahun 2024	16
Tabel	2.8	Perkara yang Diputus Tepat Waktu Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	16
Tabel	2.9	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	17
Tabel	2.10	Perkara Perdata melalui Mediasi Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	17
Tabel	2.11	Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	17
Tabel	2.12	Realisasi Anggaran Posbakum Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	19
Tabel	2.13	Realisasi Anggaran Prodeo Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	19
Tabel	3.1	Rekap Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	20
Tabel	3.2	Jumlah Personil Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	21
Tabel	3.3	Jumlah Jabatan yang Kosong Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	21
Tabel	3.4	Perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan Tahun 2024	21
Tabel	3.5	Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Tahun 2024	21
Tabel	3.6	Kenaikan pangkat periode April dan Oktober Tahun 2024	22
Tabel	3.7	Jumlah SDM berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan Tahun 2024	22
Tabel	3.8	Mutasi Tenaga Teknis Selama Tahun 2024	23
Tabel	3.9	Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2024	23
Tabel	3.10	Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2024	23
Tabel	3.11	Usul Promosi Jabatan Tahun 2024	24
Tabel	3.12	Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun Tahun 2024	24
Tabel	3.13	Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat Tahun 2024	27



Tabel 4.1	Pagu Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	28
Tabel 4.2	Pagu Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	28
Tabel 4.3	Pagu Anggaran setelah ABT DIPA 01 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	29
Tabel 4.4	Revisi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	29
Tabel 4.5	Revisi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	30
Tabel 4.6	Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	31
Tabel 4.7	Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	32
Tabel 4.8	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	33
Tabel 4.9	Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	33
Tabel 4.10	Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	34
Tabel 4.11	Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	35
Tabel 4.12	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	37
Tabel 4.13	Implementasi e-Court Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	42
Tabel 4.14	Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	46
Tabel 4.15	Data Perkara Pidana e-Berpadu Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Peta Wilayah Kabupaten Tulungagung	12
Gambar	2.1	Penandatanganan MoU Posbakum Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024	18
Gambar	4.1	Meja Layanan e-Court Pengadilan Negeri Tulungagung	42
Gambar	4.2	Buku saku e-Court Pengadilan Negeri Tulungagung	43
Gambar	4.3	Informasi e-Court pada media sosial Pengadilan Negeri Tulungagung	44
Gambar	4.4	Informasi e-Court pada videotron GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung	44
Gambar	4.5	Leaflet e-Court Pengadilan Negeri Tulungagung	45
Gambar	4.6	SIPP Pengadilan Negeri Tulungagung	45
Gambar	4.7	Aplikasi e-Berpadu Pengadilan Negeri Tulungagung	47
Gambar	5.1	Piagam Penghargaan WBK dari Kemenpan RB	48
Gambar	5.2	PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung	50
Gambar	5.3	SK PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung	52
Gambar	5.4	Maklumat Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung	52
Gambar	5.5	SOP PTSP Pengelolaan Surat Masuk dan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung	52
Gambar	5.6	SOP PTSP Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tulungagung	53
Gambar	5.7	SOP PTSP Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana (Tipiring) Pengadilan Negeri Tulungagung	53
Gambar	5.8	SOP PTSP Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana (Sita & Geledah) Pengadilan Negeri Tulungagung	53
Gambar	5.9	SOP PTSP Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung	53
Gambar	5.10	SOP PTSP Pelayanan Bagi Disabilitas Pengadilan Negeri Tulungagung	54
Gambar	5.11	Instagram dan Youtube Pengadilan Negeri Tulungagung	57
Gambar	5.12	Nomor Whatsapp Pengadilan Negeri Tulungagung	57
Gambar	5.13	Mesin Antrian PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung	58
Gambar	5.14	Aplikasi SIPAPI Pengadilan Negeri Tulungagung	58
Gambar	5.15	Aplikasi Form Peralon Pengadilan Negeri Tulungagung	59
Gambar	5.16	Aplikasi SIAP AKSI Pengadilan Negeri Tulungagung	60
Gambar	5.17	Pelaksanaan Inovasi Eraterang Mlaku-mlaku (EMA) Pengadilan Negeri Tulungagung	60
Gambar	5.18	Aplikasi VIRAL Pengadilan Negeri Tulungagung	61
Gambar	5.19	Aplikasi E-WAAS Pengadilan Negeri Tulungagung	61
Gambar	5.20	Form Penilaian Personal Digital Pengadilan Negeri Tulungagung	62
Gambar	5.21	Layanan Pengadilan Negeri Tulungagung pada MPP Kabupaten Tulungagung	63
Gambar	5.22	Pelaksanaan Inovasi Sidarling Pengadilan Negeri Tulungagung	63
Gambar	5.23	Aplikasi AMORA Pengadilan Negeri Tulungagung	64
Gambar	5.24	Aplikasi Time Table dan Notifikasi Upaya Hukum	64



		Pengadilan Negeri Tulungagung	
Gambar	5.25	Aplikasi IKAN PATIN Pengadilan Negeri Tulungagung	65
Gambar	5.26	Aplikasi SIMPUL DASI Pengadilan Negeri Tulungagung	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional di bidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tulungagung telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kebijakan yang diterapkan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024 berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan. Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **A. Penyelesaian Perkara**

Pada tahun 2024 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tulungagung terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Tahun 2024, Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung mengeluarkan kebijakan yaitu:

1. Mengimplementasikan “*One Day Minutation*” sebagai langkah agar presentase SIPP Pengadilan Negeri Tulungagung pada Peta SIPP Mahkamah Agung bisa hijau, yaitu diatas 90%.
2. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.
3. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam *court calender*.
4. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
5. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.



## B. Manajemen Perkara

Manajemen perkara di lingkungan peradilan telah diwujudkan dengan dibangunnya *Case Management System*. Lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di tahun 2024, manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan antara lain:

### 1. SIPP Versi 5.4.0

- Pengembangan fitur Administrasi Berkas Perkara secara elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (Bundel A-B);
- Perbaikan fitur Integrasi Data Dakwaan dan Pasal Dakwaan dari Aplikasi e-Berpadu ke Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama;
- Perbaikan fitur Data Penahanan di bagian Lama Hari (Jumlah Hari) Penahanan;
- Perbaikan fitur Jadwal Sidang untuk pengisian/perekaman Data Relas;
- Perbaikan di bagian kolom tanggal Penerimaan Kontra Memori Kasasi yang tidak tampil pada Pihak Turut Termohon;
- Optimasi penyajian data pada fitur Perkara Yang Ditangani sehingga data dapat lebih cepat tampil;
- Perubahan dalam pengisian/perekaman (input) data Alamat Pihak di bagian Data Umum;
- Perbaikan pada Pemilihan Jam Pelaksanaan di bagian Jadwal Pemeriksaan PK;
- Perbaikan fitur Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama apabila memilih opsi Surat Tercatat (POS) sehingga dapat memilih Hari Sabtu atau Minggu;
- Perbaikan fitur Jurnal Permohonan Eksekusi jika Eksekusi diajukan lebih dari satu kali pada Lingkungan Peradilan Umum;
- Perbaikan fungsi pengisian/perekaman Data Pemberitahuan Putusan Pidana Tipikor;
- Perbaikan fitur Jurnal Keuangan Kasasi untuk Perkara Pasca Pailit sehingga dapat menampilkan list Jenis Biaya;
- Perbaikan pada fungsi Unduh Petitum untuk Perkara Pasca Pailit;



## 2. SIPP Versi 5.5.0

- 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Integrasi Data dan Dokumen Elektronik antara Aplikasi SIPP Tingkat Pertama dengan Aplikasi SIAP MA-RI;
- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan/Penyempurnaan Fitur pada proses Register Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali;
- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan/Penyempurnaan Fitur pada proses Unggah Dokumen Elektronik Bundel A-B;
- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan/Penyempurnaan Fitur Barcode pada Dokumen Elektronik Surat Pengantar;
- 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Status Permohonan Kasasi (Tanggal Berkas Diterima di MA, Nomor dan Tanggal Register Perkara MA) yang Datanya Terintegrasi dengan Aplikasi SIAP MA-RI;
- 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Tautan untuk Mengunggah Bukti Elektronik yang berukuran besar ataupun tidak berformat dokumen pada Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali;
- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan/Penyempurnaan Fitur Putusan Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali yang Datanya Terintegrasi dengan Aplikasi SIAP MA-RI;
- 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Notifikasi melalui Nomor Whatsapp ataupun Email Panitera yang berdomain @mahkamahagung.go.id sesuai yang terdaftar pada Aplikasi SIKEP;
- 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Status Kehidupan Pihak Berperkara (Hidup/Wafat) pada Halaman Detil Kasasi/Peninjauan Kembali;
- 4 Lingkungan Peradilan : Optimasi fitur Integrasi Aplikasi SIPP Tingkat Pertama dengan Aplikasi Direktori Putusan sehingga Dapat Mengunggah dan Mengirim Perbaikan Putusan melalui Aplikasi SIPP;
- 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Perekaman Data Pertimbangan Hukum pada Putusan Akhir;
- Peradilan Umum : Perbaikan dan Pembaharuan Nama Kode Proses pada Fitur/Halaman SPPT-TI Data Diterima;

## 3. SIPP Versi 5.5.1

- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan Integrasi Upaya Hukum Secara Elektronik;

## 4. SIPP Versi 5.5.2

- 4 Lingkungan Peradilan : Optimasi Integrasi Upaya Hukum Secara Elektronik;



- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan/Penyempurnaan Fitur pada Proses Unggah Bundel A-B pada Halaman Detil Permohonan Kasasi dan PK;
  - 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan fitur Monitoring Antrian API pada SIPP Lokal/Tingkat Pertama;
  - 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada fungsi Perekaman Data Pemberitahuan Putusan;
  - 3 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada fitur Pencabutan Perkara Banding yang Diajukan melalui e-Court;
  - 3 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada fungsi Generate Virtual Account Biaya Kasasi dan PK;
5. SIPP Versi 5.6.0
- 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan fitur Deteksi Dini (Early Case Detection System);
  - 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan fitur Permohonan Peninjauan Kembali lebih dari Satu Kali;
  - 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan fitur Pengunggahan Berkas Elektronik Bundel A-B pada Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan fitur Pengiriman Data Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan fitur Perekaman Data Tanggal Penyempurnaan Novum pada Upaya Hukum Peninjauan Kembali;
  - 4 Lingkungan Peradilan : Penambahan fitur Pengisian Alasan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali;
  - 4 Lingkungan Peradilan : Optimasi fitur Integrasi Data (API) Aplikasi SIPP dengan SIAP, Aplikasi SIPP dengan e-Court, Aplikasi SIPP dengan e-Berpadu;
  - 4 Lingkungan Peradilan : Optimasi fitur Update Aplikasi SIPP;
  - 3 Lingkungan Peradilan (Umum, Mil, MS) : Penambahan fitur Laporan Kasasi pada Halaman Detil Register Kasasi;
  - 3 Lingkungan Peradilan (Umum, TUN, Agama) : Perbaikan pada fungsi Hapus Data Eksekusi;
  - 3 Lingkungan Peradilan (Umum, TUN, Agama) : Perbaikan pada fitur Pendaftaran Perkara melalui Prodeo (yang berasal dari e-Court);
  - 3 Lingkungan Peradilan (Umum, TUN, Agama) : Perbaikan pada fitur Pendaftaran Permohonan Banding/Cabut (yang berasal dari e-Court);



- 3 Lingkungan Peradilan (Umum, TUN, Agama) : Penambahan Opsi Surat Tercatat pada Perekaman Data Pemberitahuan Putusan dan Pelaksanaan Relas;
- Peradilan Umum : Penambahan Vonis Putusan Nilai Ganti Kerugian pada Perkara Pidana;
- Peradilan Umum : Penambahan Fitur Perekaman Data Calon Mempelai pada Perkara Permohonan Dispensasi Nikah;
- Peradilan Umum : Perubahan Nomenklatur Anak Korban menjadi Korban pada Halaman Tab Data Umum;
- Peradilan Umum : Perbaiki fitur Perekaman Data Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan;
- Peradilan Umum : Perbaiki fitur Perekaman Data Pelaksanaan Konstatering Eksekusi Hak Tanggungan;
- Peradilan Umum : Perbaiki fitur Perekaman Data Pelaksanaan Eksekusi BPSK;
- Peradilan Umum : Penambahan opsi Delegasi Eksekusi pada Jenis Delegasi;
- Peradilan Umum : Perbaiki pada fungsi Cetak Template Akta Banding Pidana;
- Peradilan Umum : Penambahan Opsi pada Alasan Tidak Dilaksanakannya Eksekusi;

#### 6. 5.6.1

- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaiki pada fitur Unggah Bundel A-B;
- 3 Lingkungan Peradilan : Perbaiki pada Halaman List/Register Eksekusi;
- 3 Lingkungan Peradilan (PN, DilMil, MS) : Perbaiki pada pilihan Rumah Tahanan saat menginput/mengedit Data Penahanan;

#### 7. 5.6.2

- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaiki pada file Bundel A-B yang Hilang/Tidak Tampil;
- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaiki pada fungsi Pengunggahan Bundel A-B;
- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaiki pada fungsi perekaman data Vonis Putusan PK;
- 3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN): Perbaiki fitur Pengunggahan Relas/Dokumen Pemberitahuan/Panggilan;



- 3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN): Perbaikan fungsi perekaman data Eksekusi;
8. 5.6.3
- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada tombol Kirim data Kasasi/PK;
9. 5.6.4
- 4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada fungsi Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi/PK;

### C. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut meliputi:

1. Website Pengadilan Negeri Tulungagung yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses perkara sejak perkara didaftarkan/diterima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasinya. Selain itu website Pengadilan Negeri Tulungagung sudah dilengkapi dengan *screenreader* sehingga kaum disabilitas dapat mengakses website Pengadilan Negeri Tulungagung.
2. Media Sosial Pengadilan Negeri Tulungagung seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter yang mana Pengadilan Negeri Tulungagung aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat baik itu informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Tulungagung maupun kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Tulungagung.
3. Nomor Whatsapp untuk pengaduan dan informasi yang mana masyarakat dapat bertanya atau dapat memberikan saran dan masukan kepada Pengadilan Negeri Tulungagung.
4. Sarana *Teleconference* yang berfungsi untuk membantu saksi dalam persidangan anak apabila saksi mengalami trauma jika bertemu dengan terdakwa.
5. Sarana meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan.
6. Pemisahan akses masuk ke Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung antara Pegawai dan Pengunjung, yang bertujuan untuk membatasi antara ruangan yang dapat diakses oleh pegawai dan pengunjung/masyarakat



pencari keadilan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sterilisasi ruangan agar baik Hakim maupun seluruh pegawai Pengadilan Negeri Tulungagung tidak dapat secara bebas berhubungan langsung dengan pengunjung/ masyarakat pencari keadilan.

7. Aplikasi PTSP+ dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Tulungagung.
8. Aplikasi E-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court.
9. Meja Layanan E-Court yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung untuk membantu Advokat dan Pengguna Lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Tulungagung.
10. Aplikasi si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Tulungagung secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ *Surveillance*) yaitu form kuisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP.
11. Aplikasi Antrian Persidangan yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain: mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.
12. Aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) yang dapat membantu Pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan, bebas korupsi, terintegrasi, rahasia, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.
13. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang mana semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah.
14. Aplikasi ERATERANG dimana aplikasi tersebut berupa form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung bagi masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan secara online sehingga dalam



mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Tulungagung.

15. Aplikasi Form Peralon yang merupakan aplikasi yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung bagi Para Pemohon yang akan mengajukan surat permohonan sehingga dalam mengajukan surat permohonan tersebut Para Pemohon dapat mengisi aplikasi tersebut dari tempat masing-masing ataupun dari Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang telah disediakan fasilitas khusus untuk aplikasi Form Peralon. Aplikasi Form Peralon dapat diakses melalui URL dengan alamat <https://sites.google.com/view/form-peralon/beranda>.
16. Aplikasi SIAP AKSI (Sistem Aplikasi Akta Catatan Sipil) merupakan hasil kerjasama Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan salinan penetapan secara online, dan mempercepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung dalam pelayanan terkait perbaikan maupun perubahan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Monitoring Realisasi Anggaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi, capaian kegiatan, sisa anggaran dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, Sekretaris dan Bagian Umum dan Keuangan.
18. *Time Table* dan Notifikasi Upaya Hukum yang bertujuan untuk meminimalisir keterlambatan Pengiriman Berkas Upaya Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Tulungagung baik untuk perkara Pidana maupun Perkara Perdata dan untuk memonitoring perpanjangan penahanan perkara yang masih berjalan pada Pengadilan Negeri Tulungagung.
19. Audio Gratifikasi yaitu aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk *public campaign* Pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas Pengadilan.
20. Pembacaan Pesan Anti Korupsi Setelah Pembukaan Sidang yaitu pada saat persidangan akan dimulai Majelis/Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu Pesan Anti



Korupsi. Hal ini sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019. Pembacaan Pesan Anti Korupsi tersebut merupakan salah satu bentuk *public campaign* pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas pengadilan.

21. Eraterang Mlaku-mlaku (EMA), dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung dalam hal permintaan surat keterangan bekerjasama dengan kecamatan di Wilayah Kabupaten Tulungagung.
22. SIPAPI (Sistem Informasi Para Pihak), dimana aplikasi ini dipergunakan sebagai Pemberitahuan Status Kehadiran Pihak dan dipergunakan untuk Pemanggilan Para Pihak yang akan menjalankan persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung.
23. Inovasi IKAN PATIN (Izin Keluar Kantor Pulang Cepat dan Datang Terlambat Online), dimana inovasi ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai dalam hal pembuatan surat izin dan mengontrol kedisiplinan Pegawai dengan lebih efektif dan efisien.
24. VIRAL (Virtual Akselerasi Layanan), merupakan layanan dimana para pengguna peradilan bisa mendapatkan seluruh kebutuhan informasi yang diinginkan melalui *gadget* yang mereka miliki melalui media Telegram.
25. Aplikasi E-WAAS (Elektronik Waarmerking Service) yang merupakan layanan berbasis digital melalui ponsel atau *gadget* untuk mempermudah pendaftaran dan pemberian informasi mengenai layanan waarmerking (pengesahan akta dibawah tangan), yang digunakan untuk kebutuhan pengambilan/ penutupan tabungan/ deposito/ asuransi/ surat berharga yang pemiliknya telah meninggal dunia dan diwariskan pada ahli warisnya.
26. SIMPUL DASI (Sistem Pengumpulan Data SAKIP) yang merupakan aplikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengumpulan data dari masing-masing bagian sebagai bahan dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tulungagung.
27. Form Penilaian Personal Kaum Rentan berbasis digital yaitu melalui google form yang dapat mempermudah pengunjung/ pengguna layanan disabilitas dalam pengisian form penilaian personal yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan layanan dan sarana prasarana yang dibutuhkan.



#### **D. Pengawasan Rutin/ Regular**

Pengadilan Negeri Tulungagung terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek pada bagian-bagian oleh Hakim Pengawas Bidang minimal satu kali dalam satu minggu dan selanjutnya memberikan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua Pengadilan selaku Koordinator Pengawas. Selanjutnya laporan pengawasan diserahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai bahan dalam rapat dinas bulanan yang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung.

Selain pengawasan dari pihak internal, di Tahun 2024 ini Pengadilan Negeri Tulungagung mendapati pembinaan dan pengawasan serta kunjungan dari pihak eksternal, diantaranya:

1. Pada tanggal 27 sd. 29 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Reguler oleh Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung RI. Pada Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA. Kegiatan Pemeriksaan Reguler ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: 119/BP/ST.PW1.1.1/II/2024 tanggal 16 Februari. Tim Pemeriksa dalam pemeriksaan reguler di Pengadilan Negeri Tulungagung meliputi:
  - Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik;
  - Administrasi Perkara;
  - Administrasi Persidangan; dan
  - Administrasi Umum.

Hasil temuan dari pemeriksaan reguler diserahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung untuk segera ditindaklanjuti.

2. Pada tanggal 27 Juni 2024 Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum dan didampingi Hakim Tinggi Bapak Bambang Kustopo, S.H., M.H. telah melaksanakan Pembinaan di Pengadilan Negeri Tulungagung yang disampaikan tentang pemahaman PERMA Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2026 serta mengingatkan kembalibahwa sebagai Aparatur Peradilan harus menerapkan 8 (delapan) Nilai Mahkamah Agung RI. Pada kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan bahwa kesiapan PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung kepada masyarakat pencari keadilan baik penguasaan tugas pokok dan



fungsi para petugas PTSP dan sarana fisik dari PTSP tersebut. Petugas PTSP dan Security merupakan wajah pertama layanan pengadilan sehingga diharapkan melayani sesuai standard dan selalu menerapkan 5S dalam setiap pelayanannya.

3. Pada tanggal 7 Agustus 2024, telah dilaksanakan kegiatan assessment Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggu dan Tangguh (AMPUH), Pengawasan dan Pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pengawasan terhadap penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan. Sedangkan tujuan Assessment Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh merupakan Pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi penilaian proses kerja, kinerja mutu pelayanan, tertib administrasi perkara dan administrasi umum di Lingkungan Peradilan Umum untuk mewujudkan Peradilan yang Unggul.

## 1.2. VISI, MISI DAN MOTTO

**Visi** adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tulungagung. Visi Pengadilan Negeri Tulungagung mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG YANG AGUNG”**

**Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Tulungagung antara lain:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tulungagung.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tulungagung.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tulungagung.

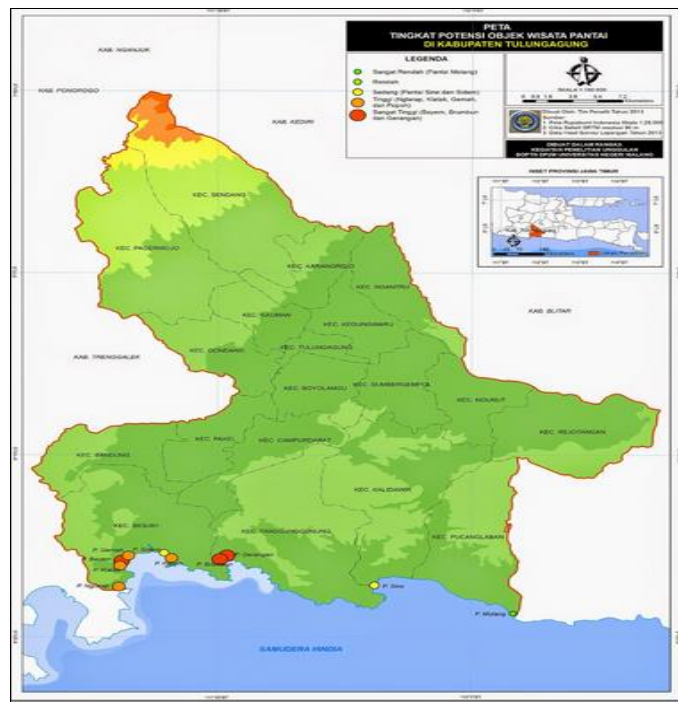
**Motto** Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA adalah “MANTAP” yang merupakan kepanjangan dari:

M : Melayani  
A : Akuntabel  
N : Netral  
T : Tertib  
A : Amanah  
P : Profesional

### 1.3. WILAYAH YURISDIKSI

Pengadilan Negeri Tulungagung yang berada di Jalan Jayengkusuma Nomor 21 Tulungagung, mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 19 ( Sembilan belas ) kecamatan yaitu :

1. Tulungagung
2. Sendang
3. Pagerwojo
4. Karangrejo
5. Kauman
6. Gondang
7. Bandung
8. Ngantru
9. Kedungwaru
10. Boyolangu
11. Campurdarat
12. Besuki
13. Pakel
14. Sumbergempol
15. Tanggunggunung
16. Kalidawer
17. Pucanglaban
18. Ngunut
19. Rejotangan



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Tulungagung



Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Selatan: Samudra Hindia
- Sebelah Timur: Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo

#### **1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas Pengadilan Negeri Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Lingkungan Wilayah Kabupaten Tulungagung, Pengadilan Negeri Tulungagung mempunyai fungsi diantaranya:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



## BAB II

### KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

#### 2.1 Keadaan Perkara di Peradilan Umum

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Tulungagung selama tahun 2024 berdasarkan data pada SIPP dan laporan bulanan perkara, adalah sebagai berikut:

##### 2.1.1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Perkara Putus Tahun 2024	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2024
<b>PIDANA</b>						
1	Pidana Biasa	48	267	265	0	50
2	Pidana Cepat/Ringan	0	564	564	0	0
3	Pidana Lalu Lintas	0	8.621	8.621	0	0
4	Pidana Khusus Anak	0	2	2	0	0
5	Pidana Praperadilan	1	1	2	0	0
<b>Jumlah Perkara Pidana</b>		<b>49</b>	<b>9.455</b>	<b>9.454</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>PERDATA</b>						
1	Gugatan	18	96	81	14	19
2	Permohonan	30	532	483	65	14
3	Perlawanan/Bantahan	0	1	0	0	1
4	Gugatan Sederhana	1	62	34	28	1
<b>Jumlah Perkara Perdata</b>		<b>49</b>	<b>691</b>	<b>598</b>	<b>107</b>	<b>35</b>
<b>Jumlah Keseluruhan Perkara</b>		<b>98</b>				<b>85</b>

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

##### 2.1.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Sisa Banding Tahun 2023	Diterima Tahun 2024	Dikirim	Dicabut	Sisa Banding Tahun 2024
1	Pidana	2	19	20	1	0
2	Perdata	0	15	14	0	1

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Banding Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



### 2.1.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Jenis Perkara	Sisa Kasasi Tahun 2023	Diterima Tahun 2024	Dicabut	Diputus	Sisa / Masih dalam proses
1	Pidana	1	18	1	12	6
2	Perdata	1	11	0	3	9

Tabel 2.3 Keadaan Perkara Kasasi Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

### 2.1.4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	Jenis Perkara	Sisa PK Tahun 2023	Diterima Tahun 2024	Dicabut	Diputus	Sisa / Masih dalam proses
1	Pidana	3	18	0	12	9
2	Perdata	0	2	0	1	1

Tabel 2.4 Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

## 2.2 Penyelesaian Perkara

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tulungagung terdiri dari perkara pidana dan perkara perdata. Jumlah keseluruhan perkara masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Perkara Putus Tahun 2024	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2024	% Penyelesaian
1	Pidana Biasa	48	267	265	0	50	84,13%
2	Pidana Cepat/Ringan	0	564	564	0	0	100%
3	Pidana Lalu Lintas	0	8.621	8.621	0	0	100%
4	Pidana Khusus Anak	0	2	2	0	0	100%
5	Pidana Praperadilan	1	1	2	0	0	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>9.455</b>	<b>9.454</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	

Tabel 2.5 Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Perkara Putus Tahun 2024	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2024	% Penyelesaian
1	Gugatan	18	96	81	14	19	83,33%
2	Permohonan	30	532	483	65	14	97,51%
3	Perlawanan/ Bantahan	0	1	0	0	1	0%
4	Gugatan Sederhana	1	62	34	28	1	98,41%
5	Eksekusi	4	13	2	5	10	41,18%
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>704</b>	<b>600</b>	<b>112</b>	<b>45</b>	

Tabel 2.6 Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

### 2.2.1 Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Sisa Perkara Tahun 2023 yang Diputus Tahun 2024	Sisa Perkara Tahun 2023 yang Belum Diputus Tahun 2024
1	Pidana	49	49	0
2	Perdata	49	49	0
	<b>Jumlah</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>

Tabel 2.7 Sisa Perkara Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tulungagung yang Diputus Tahun 2024

### 2.2.2 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP serta jumlah ketidaksesuaian pada unsur penyelesaian perkara tepat waktu pada Evaluasi Implementasi SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan (PIDANA – Tanggal Pendaftaran s/d Tanggal Putusan / PERDATA – Tanggal Sidang Pertama s/d Tanggal Putusan).

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Perkara Putus Tepat Waktu	Perkara Putus >5 bulan	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2024
1	Pidana	49	834	833	0	0	50
2	Perdata	49	691	587	11	107	35
	<b>Jumlah</b>	<b>98</b>	<b>1.525</b>	<b>1.420</b>	<b>11</b>	<b>107</b>	<b>85</b>

Tabel 2.8 Perkara yang Diputus Tepat Waktu Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



### 2.2.3 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

No	Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2024	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1	Pidana	833	814	815	815	Banding : 19 Kasasi : 18 PK : 18
2	Perdata	705	690	694	703	Banding : 15 Kasasi : 11 PK : 2
	<b>Jumlah</b>	<b>1.538</b>				

Tabel 2.9 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

### 2.2.4 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2024	Mediasi		Keterangan
			Berhasil	Gagal	
1	Perdata	76	24	49	Berhasil dengan Akta Perdamaian : 24 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 48 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 1

Tabel 2.10 Perkara Perdata melalui Mediasi Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

### 2.2.5 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diversi Tahun 2024	Diversi		Keterangan
			Berhasil	Gagal	
1	Pidana Khusus Anak	0	0	0	Berhasil dengan Akta Perdamaian : 0 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 0 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 0

Tabel 2.11 Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

## 2.3 Program Prioritas Nasional

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya, organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki Program Prioritas Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Peradilan Umum. Beberapa Program Prioritas Nasional Badilum antara lain: Layanan Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara.

### 2.3.1 Posbakum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin yang tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Tulungagung adalah berupa jasa Advokat/ Pengacara Piket untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat terutama untuk masyarakat tidak mampu.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tulungagung telah menunjuk Perkumpulan Biro Konsultasi Hukum Kartini sebagai Penyedia Jasa Layanan Hukum pada Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 1862/SEK.PN.W14-U26/PL1.1.4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung beserta Perkumpulan Biro Konsultasi Hukum Kartini telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 1/KPN.PN.W14-U26/PL1.1.4/I/2024 tanggal 2 Januari 2024.



Gambar 2.1 Penandatanganan MoU Posbakum Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat sebanyak 448 layanan. Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Tulungagung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah). Adapun Capaian Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Nama LBH/ Penyedia Layanan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Posbakum	Perkumpulan Biro Konsultasi Hukum Kartini	44.000.000	44.000.000	100%

Tabel 2.12 Realisasi Anggaran Posbakum Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

### 2.3.2 Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015, Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental. Pada tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Tulungagung tidak memperoleh anggaran untuk kegiatan Sidang Keliling/ Sidang di luar gedung Pengadilan.

### 2.3.3 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Negeri Tulungagung memperoleh anggaran untuk kegiatan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) perkara dan telah terealisasi sebesar 100%. Adapun Capaian Realisasi Anggaran Perkara Prodeo Pada Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah Perkara	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Prodeo	2	380.000	380.000	100%

Tabel 2.13 Realisasi Anggaran Prodeo Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



### BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Tulungagung, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Tulungagung) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*), maka kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
1.	Ketua	1	-	-
2.	Wakil Ketua	1	-	-
3.	Hakim	7	-	-
4.	Panitera	1	-	-
5.	Sekretaris	1	-	-
6.	Panitera Muda	2	1	-
7.	Kasubbag.	3	-	-
8.	Panitera Pengganti	7	-	-
9.	Jurusita	2	-	-
10.	Jurusita Pengganti	1	-	-
11.	Operator - Penata Layanan Operasional	1	-	-
12.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	5	-	-
13.	Klerek-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	9	-	-
14.	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	2	-	-
15.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	1	-	-
16.	PPNPN DIPA	10	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>	<b>1</b>	-

Tabel 3.1 Rekap Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



Sedangkan untuk Jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENGADILAN	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM				STRUKTURAL KEPANITERAAN			PP	KEJURUSITAAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT			FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	TENAGA HONORER
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/PN	HAKIM TINGGI/ HAKIM	HAKIM DP PADA PT	HAKIM/HT A D HOC	CAKIM	PANITERA	WAPAN	PANMUD		PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN				
1	PN Tulungagung	1A	1	1	7	0	0	9	1	0	2	7	2	1	1	0	3	0	9	44	10

Tabel 3.2 Jumlah Personil Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

Sedangkan untuk Jumlah Jabatan yang kosong pada Pengadilan Negeri Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENGADILAN	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/PN	HAKIM	PANITERA	PANMUD		PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS			
1	PN Tulungagung	1A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabel 3.3 Jumlah Jabatan yang Kosong Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Tulungagung sebanyak 1525 perkara. Pada tahun 2024 terdapat 4 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Adapun perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

PENGADILAN	JUMLAH		PERBAN- DINGAN	Sesuai aturan	JUMLAH PERKARA TH. 2024				JML MAJELIS HAKIM	BEBAN KERJA TIAP MAJELIS HAKIM PER BULAN
	HAKIM	KEPANITERAAN			PIDANA	PERDATA	LAIN- LAIN	JUMLAH		
Pengadilan Negeri Tulungagung	9	13	1:2	Belum	834	691	-	1.525	4	522

Tabel 3.4 Perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan Tahun 2024

NO	PENGADILAN	JUMLAH		PERKARA TAHUN 2024			BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	JUMLAH	
1	PN. Tulungagung	9	4	834	691	1.525	522

Tabel 3.5 Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Tahun 2024



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2024 belum sesuai dengan aturan. Berdasarkan Buku I Mahkamah Agung Tahun 2007, Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Kelas I A terdiri dari maksimum 12 Majelis Hakim atau maksimum 36 orang Hakim termasuk Wakil Ketua. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 6 orang Panitera Pengganti, 5 (lima) orang Juru Sita dan maksimal 10 Jurusita Pengganti.

Untuk kenaikan pangkat periode April dan Oktober Tahun 2024 terdapat 8 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENGADILAN	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	KEPANITERAAN	KESEKRETARIATAN	PELAKSANA	PERIODE
1	PN Tulungagung	2	3	-	-	-	APRIL
		-	-	-	1	2	DESEMBER

Tabel 3.6 Kenaikan pangkat periode April dan Desember Tahun 2024

### 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan Pendidikan

Berdasarkan Kepangkatan/golongan dan Pendidikan Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

JUMLAH SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN DAN PENDIDIKAN TAHUN 2024					
KEPANGKATAN/GOLONGAN			PENDIDIKAN		
IV/e	:	-	S2	:	4
IV/d	:	2	S1	:	37
IV/c	:	1	D3	:	2
IV/b	:	2	SMA	:	1
IV/a	:	5	SMP	:	-
III/d	:	12	SD	:	-
III/c	:	2			
III/b	:	5			
III/a	:	13			
II/d	:	1			
II/c	:	1			
II/b	:	-			
II/a	:	-			

Tabel 3.7 Jumlah SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan, Pendidikan Tahun 2024

### 3.2. Mutasi

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Tulungagung terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Rekap mutasi Pegawai pada Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:



PENGADILAN	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM TINGGI / HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN / PP				MUTASI KEJURU SITAAN			
	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU
Pengadilan Negeri Tulungagung	0	0	0	1	2	0	3	3	2	0	0	0	1	0

Tabel 3.8 Mutasi Tenaga Teknis Selama Tahun 2024

Pada tahun 2024 mutasi Pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Tulungagung sebanyak 4 orang antara lain:

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No. Tanggal)
1	Derry Wisnu Broto Karseno P, S.H., M.Hum. NIP. 198107052007041001	Hakim PN Tulungagung	Hakim PN Tuban	No707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 Tanggal. 27 Juni 2024
2	Sutiawan, S.H. NIP. 196912131993031002	Panmud Pidana PN Tulungagung	Panmud Perdata PN Ngawai	No. 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 Tanggal. 27 November 2023
3	Gunadi, S.H. NIP. 196512291992031003	Panmud Hukum PN Tulungagung	Panmud Pidana PN Blitar	No. 641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 Tanggal. 22 April 2024
4	Budiyannoor, S.H. NIP. 197209171994031001	Panitera PN Tulungagung	Panitera PN Pangkalan Bun	No. 1105/DJU/SK/KP4.1/3/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024

Tabel 3.9 Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2024

Pada tahun 2024 mutasi Pegawai yang keluar dari Pengadilan Negeri Tulungagung sebanyak 4 orang antara lain:

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No. Tanggal)
1.	Darwin, S.H. NIP. 19701212 199103 1 006	Panitera Muda Pidana PN Ponorogo	Panitera Pengganti PN Tulungagung	No. 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 Tanggal 27 November 2023
2.	Endro Asmono, S.H., M.H. NIP. 197502072001121004	Panmud Pidana PN Blitar	Panmud Hukum PN Tulungagung	No. 641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 Tanggal. 22 April 2024
3.	La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H. NIP. 198102102007041001	Wakil Ketua PN Tahuna	Hakim PN Tulungagung	No. 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 Tanggal. 27 Juni 2024
4.	Didimus Hartanto Dendot, S.H. NIP. 197705122003121001	Hakim PN Blitar	Hakim PN Tulungagung	No. 1090/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024

Tabel 3.10 Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2024

### 3.3. Promosi

Secara teknis, promosi bagi pegawai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun 2009, Pengangkatan dalam jabatan Hakim Ketua/Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, dan untuk Pengangkatan dalam Jabatan



Struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri.

Di lingkungan Pengadilan Negeri Tulungagung sudah dilaksanakan pemisahan Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang mana Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Seorang Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pada Tahun 2024 usul promosi jabatan di lingkungan Pengadilan Negeri Tulungagung yang secara keseluruhan sebanyak - orang, yaitu:

NO	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	PROMOSI MENJADI	SK PEJABAT NO. & TGL
1	-	-	-	-

Tabel 3.11 Usul Promosi Jabatan Tahun 2024

### 3.4. Pensiun

Pada Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) pegawai yang menerima hak pensiun di lingkungan Pengadilan Negeri Tulungagung yang dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENGADILAN	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT NO. & TGL
1	PN Tulungagung	Supiadi, S.H. NIP. 196603081986031003	Juru Sita	1 April 2024	No. 00069/13001/AZ/I/24 Tanggal 31 Januari 2024
2.	PN Tulungagung	Dwi Suryaning R, S.H. NIP. 196408241983022001	Panmud Perdata	1 September 2024	No. 00429/13001/AZ/VI/24 Tanggal 4 Juni 2024
3.	PN Tulungagung	Sukarlinah, S.H. NIP. 196411171985022001	Panitera Pengganti	1 Desember 2024	No. 00572/13001/AZ/VIII/2024 Tanggal 5 Agustus 2024

Tabel 3.12 Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun Tahun 2024

### 3.5. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tulungagung telah mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi, baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Surabaya atau yang diselenggarakan oleh instansi lain. Pada Tahun 2024 Pelatihan bimbingan teknis maupun sosialisasi banyak dilakukan secara daring.

Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti diklat baik teknis maupun non teknis pada tahun 2024, sebagai berikut:



No	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
1	Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.	Ketua		E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	Pusat Edukasi Antikorupsi
			Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
				Training Of Tutor dan Training Of Mentor Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
			Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
2	Deni Albar, S.H.	Hakim		Training Of Tutor dan Training Of Mentor Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
3	Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.	Hakim		Training Of Tutor dan Training Of Mentor Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
4	Firmansyah Irwan, S.H.	Hakim		Training Of Tutor dan Training Of Mentor Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
			Pelatihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)		Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
5	Gatot Parmujianto, S.H.	Sekretaris		Pelatihan Manajemen Resiko	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MARI bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
6	Sutiawan, S.H.	Panitera Muda Pidana		Pelatihan Manajemen Resiko	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MARI bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
7	Wulansari, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelatihan Pengelolaan BMN		Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
8	Vinka Fitri Aprilia, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Pelatihan Kompetensi Teknis Manajemen ASN Jenjang Pengawas/Jabatan Setara		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan MARI bekerja sama dengan Pusat Pengembangan



No	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
					Kepegawaian ASN BKN
9	Dyah Ayu Mulyasari, S.E.	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Sertifikasi Bendahara Penerimaan		Kementerian Keuangan
10	I Made Adhi Yudisatria, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
11	Ratumela Marten P.S, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
12	Rangga Rio Admi S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
13	Laelatul Anisa Faradiba S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
14	I Nengah Maliarta S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan



No	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
15	Marya Meilani Teuf, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
16	Reyhan Bagaskara F.S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
17	Yoshua Danuri Damanik S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
18	Ryan Ilham Fibriansyah S.H	Klerek – Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum		Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
19	Yunita Magdalena Br. Situmorang, A.Md.A.B.	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara		Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MARI bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
20	Nurita Suri Pundini, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan		Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya
21	Dewi Pithaloka, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan		Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya
22	Afifa Tyastiti, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan		Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Tabel 3.13 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat Tahun 2024



## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### 4.1 Pengelolaan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Tulungagung memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan jumlah sebesar Rp. 7.455.150.000 (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk DIPA 01 dengan Nomor: SP DIPA- 005.01.2.098256/2024 dan sebesar Rp. 176.340.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk DIPA 03 dengan Nomor: SP DIPA- 005.03.2.099149/2024.

Satker Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun Anggaran 2024 mempunyai 2 program yaitu: Program 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Program 005.03.07 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program utama tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung pada Tahun 2024.

Anggaran pada Pengadilan Negeri Tulungagung terdiri dari 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yaitu DIPA 01 yang Unit Organisasinya adalah Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 yang Unit Organisasinya adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun alokasi anggaran Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.019.382.000,-
2	Belanja Barang	1.435.768.000,-
3	Belanja Modal	-
Total		7.455.150.000,-

Tabel 4.1 Pagu Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
1	Belanja Pegawai	-
2	Belanja Barang	176.340.000,-
3	Belanja Modal	-
Total		176.340.000,-

Tabel 4.2 Pagu Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



## Pelaksanaan Revisi Anggaran

Selama tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Tulungagung memperoleh ABT (Anggaran Belanja Tambahan) pada DIPA 01 yaitu:

- 1) Belanja Pegawai: Penambahan pada Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 235.000.000,-
- 2) Belanja Barang: Penambahan pada Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp 50.000.000,-
- 3) Belanja Modal: Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebesar Rp 68.000.000,-

Sehingga alokasi anggaran Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.254.382.000,-
2	Belanja Barang	1.485.768.000,-
3	Belanja Modal	68.000.000,-
Total		7.808.150.000,-

Tabel 4.3 Pagu Anggaran Setelah ABT DIPA 01 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

Selama tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan revisi anggaran dengan maksud mengantisipasi terhadap perubahan administrasi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan serta untuk menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan. Pelaksanaan revisi anggaran di Pengadilan Negeri Tulungagung selama tahun 2024, yaitu:

### 1. Revisi DIPA 01 (098256)

No	Revisi	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Revisi Ke :1	15 Februari 2024	DIPA-005.01.2.098256/2024
2	Revisi Ke :2	04 April 2024	DIPA-005.01.2.098256/2024
3	Revisi Ke :3	15 Juli 2024	DIPA-005.01.2.098256/2024
4	Revisi Ke :4	11 September 2024	DIPA-005.01.2.098256/2024
5	Revisi Ke :5	16 Oktober 2024	DIPA-005.01.2.098256/2024
6	Revisi Ke :6	04 November 2024	DIPA-005.01.2.098256/2024
7	Revisi Ke :5	01 Desember 2024	DIPA-005.01.2.098256/2024
8	Revisi Ke :6	16 Desember 2024	DIPA-005.01.2.098256/2024

Tabel 4.4 Revisi DIPA 01 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



## 2. Revisi DIPA 03 (099419)

No	Revisi	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Revisi Ke :1	15 Februari 2024	DIPA-005.03.2.099149/2024
2	Revisi Ke :2	23 April 2024	DIPA-005.03.2.099149/2024
3	Revisi Ke :3	15 Juli 2024	DIPA-005.03.2.099149/2024
4	Revisi Ke :4	09 September 2024	DIPA-005.03.2.099149/2024
5	Revisi Ke :5	07 November 2024	DIPA-005.03.2.099149/2024
6	Revisi Ke :6	14 November 2024	DIPA-005.03.2.099149/2024

Tabel 4.5 Revisi DIPA 03 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

### Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tulungagung periode tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

#### Program Dukungan Manajemen

Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung

Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi

Wilayah/Provinsi : (0500) Jawa Timur

Satuan Kerja : (098256) Pengadilan Negeri Tulungagung

Alokasi : Rp 7,808,150,000

Kode	Jenis Belanja	Pagu Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.808.150.000	7.711.480.690	96.669.310
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	68.000.000	68.000.000	-
EBB.951	Layanan Sarana Internal	68.000.000	68.000.000	-
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	68.000.000	68.000.000	-
A	Tanpa Sub Komponen	68.000.000	68.000.000	-
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.000.000	68.000.000	-
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	7.740.150.000	7.643.480.690	96.669.310
EBA.994	Layanan Perkantoran	7.740.150.000	7.643.480.690	96.669.310
001	Gaji dan Tunjangan	6.254.382.000	6.165.726.814	88.655.186
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	6.254.382.000	6.165.726.814	88.655.186
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.485.768.000	1.477.753.876	8.014.124
A	Tanpa Sub Komponen	586.596.000	585.038.178	1.557.822



521111	Belanja Pramubakti, Satpam, Pengemudi, Iuran Kebersihan, Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor, Langganan Surat Kabar, Air Minum Galon, Biaya Foto Copy Penjilidan, Iuran Kebersihan Gedung Arsip	560.596.000	560.198.178	397.822
521811	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	26.000.000	24.840.000	1.160.000
<b>B</b>	<b>Langganan Daya dan Jasa</b>	<b>187.435.000</b>	<b>187.036.085</b>	<b>398.915</b>
521111	Langganan Internet, Lisensi Video Conference, Tambahan Internet	171.150.000	170.827.578	322.422
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.616.000	8.583.960	32.040
522112	Belanja Langganan Telepon	2.448.000	2.416.080	31.920
522113	Belanja Langganan Air	12.000	-	12.000
522141	Web Hosting	5.209.000	5.208.467	533
<b>C</b>	<b>Pemeliharaan Kantor</b>	<b>556.111.000</b>	<b>553.492.714</b>	<b>2.618.286</b>
523111	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	338.633.000	338.472.900	160.100
523119	Pemeliharaan Rumah Dinas	62.614.000	62.575.000	39.000
523121	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.864.000	152.444.814	2.419.186
<b>D</b>	<b>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</b>	<b>58.206.000</b>	<b>58.206.000</b>	<b>-</b>
521111	Belanja Pakaian Dinas Non Hakim, Pakaian Kerja Satpam, Pengemudi dan Pramubakti	15.750.000	15.750.000	-
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	42.456.000	42.456.000	-
<b>E</b>	<b>Rapat Koordinasi Internal</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>1.995.000</b>
521119	Konsumsi Rapat	5.000.000	3.005.000	1.995.000
<b>F</b>	<b>Konsultasi ke KPPN / Kanwil</b>	<b>44.900.000</b>	<b>43.455.899</b>	<b>1.444.101</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.900.000	43.455.899	1.444.101
<b>G</b>	<b>Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc</b>	<b>47.520.000</b>	<b>47.520.000</b>	<b>-</b>
522141	Sewa Rumah Dinas Hakim	47.520.000	47.520.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7.808.150.000</b>	<b>7.711.480.690</b>	<b>96.669.310</b>
	<b>% Realisasi Anggaran</b>		<b>98,76%</b>	

Tabel 4.6 Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung  
 Eselon I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 Wilayah/Provinsi : (0500) Jawa Timur  
 Satuan Kerja : (099149) Pengadilan Negeri Tulungagung  
 Alokasi : Rp 176,340,000

Kode	Jenis Belanja	Pagu Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	176.340.000	175.555.400	784.600
AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	-
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	-
524113	Kimwasmat	1.500.000	1.500.000	-
BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	130.460.000	129.675.400	784.600
051	Pendaftaran Berkas Perkara	43.400.000	43.382.000	18.000
052	Penetapan Hari Sidang	2.400.000	2.392.000	8.000
053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	5.400.000	5.398.000	2.000
054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	71.700.000	71.694.300	5.700
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	2.000.000	1.994.000	6.000
056	Minutasi/Upaya Hukum	4.260.000	3.809.100	450.900
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	500.000	265.500	234.500
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	800.000	740.500	59.500
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.000.000	44.000.000	-
051	Pos Bantuan Hukum	44.000.000	44.000.000	-
1049.QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	380.000	380.000	-
051	Biaya Perkara	380.000	380.000	-
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	140.000	140.000	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	240.000	240.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>176.340.000</b>	<b>175.555.400</b>	<b>784.600</b>
	<b>% Realisasi Anggaran</b>		<b>99,56%</b>	

Tabel 4.7 Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



## Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	(005.01.WA) Program Dukungan Manajemen			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	68,000,000	68,000,000	100%
	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	7,740,150,000	7,643,480,690	98.75%
	<b>Jumlah</b>	<b>7,808,150,000</b>	<b>7,711,480,690</b>	<b>98.76%</b>
2	(005.03.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	176,340,000	175,555,400	99.56%
	<b>Jumlah</b>	<b>176,340,000</b>	<b>175,555,400</b>	<b>99.56%</b>

Tabel 4.8 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

### 4.2 Pengelolaan Sarana Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tulungagung. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung. Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana/ prasarana gedung dan fasilitas perkantoran.

#### A. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	<b>Kendaraan Roda 2</b>					
1	Honda GL MAX	2002	-	1	-	
2	Honda GL MAX	2004	-	1	-	
3	Honda GLP III	2005	1	-	-	
4	Honda Supra 125 TD	2007	1	-	-	
5	Honda Supra 125 TRF	2008	1	-	-	
	<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	
	<b>Kendaraan Roda 4</b>					
1	Toyota Kijang Innova E M/T	2007	1	-	-	
2	Daihatsu Terios	2011	1	-	-	
3	Toyota Rush 1.5 S M/T	2023	1	-	-	
4	Toyota Fortuner 2.4 VRZ	2018	1	-	-	Pinjam Pakai Pemkab Tulungagung
	<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Tabel 4.9 Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024



## B. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	Ditempati
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	Ditempati
3	Rumah Dinas Hakim	4	4	-	-	Ditempati
4	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	Ditempati
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Tabel 4.10 Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

## C. Daftar Ruangan

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
9	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
10	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
11	Ruang Umum dan Keuangan	1	
12	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
13	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
14	Ruang Server	1	
15	Ruang Pelayanan PTSP	1	
16	Ruang Tunggu PTSP	1	
17	Ruang Tunggu Disabilitas PTSP	1	
18	Ruang Tamu Terbuka	2	
19	Ruang Rapat dan DC	1	
20	Ruang Command Center	1	
21	Ruang Arsip	1	
22	Ruang Perpustakaan	1	
23	Ruang Mediasi	1	
24	Ruang Tunggu Ramah Anak	1	
25	Ruang Poliklinik dan Laktasi	1	
26	Ruang Teleconference, Bapas	1	
27	Ruang Dharmayukti Karini	1	
28	Ruang Kejaksaan	1	
29	Ruang Posbakum	1	
30	Ruang Tahanan	3	
31	Mushola	1	



32	Pos Satpam	1
33	Toilet	13
34	Gudang	1
35	Kantin	1

Tabel 4.11 Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

#### D. Fasilitas Perkantoran

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	4	1 rusak ringan
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	
3	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	3	
4	Mesin Fotocopy Folio	1	
5	Lemari Besi/Metal	6	1 rusak ringan
6	Lemari Kayu	46	12 rusak ringan
7	Rak Besi	16	1 rusak ringan
8	Rak Kayu	5	2 rusak ringan
9	Filing Cabinet Besi	23	
10	Filing Cabinet Kayu	5	3 rusak ringan
11	Brandkas	4	1 rusak berat
12	Mobile File	3	
13	Tabung Pemadam Api	5	
14	CCTV - Camera Control Television System	22	
15	Papan Visual/Papan Nama	2	
16	Peta	1	
17	Alat Penghancur Kertas	1	
18	Mesin Absensi	3	
19	Hand Metal Detector	1	1 rusak ringan
20	Walkman Detector	1	1 rusak ringan
21	LCD Projector/Infocus	2	
22	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	
23	Meja Kerja Kayu	140	49 rusak ringan
24	Kursi Besi/Metal	317	21 rusak ringan
25	Kursi Kayu	63	20 rusak ringan, 4 rusak berat
26	Sice	20	8 rusak ringan
27	Bangku Panjang Besi/Metal	36	
28	Bangku Panjang Kayu	36	32 rusak ringan
29	Meja Rapat	11	



30	Meja Komputer	21	
31	Tempat Tidur Besi	1	
32	Meja Resepsionis	3	
33	Meja Marmer	1	1 rusak ringan
34	Sketsel	3	3 rusak ringan
35	Kursi Fiber Glas/Plastik	10	
36	Gantungan Jas	11	3 rusak ringan
37	Jam Mekanis	1	1 rusak berat
38	Jam Elektronik	27	11 rusak ringan
39	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	
40	Lemari Es	1	
41	A.C. Split	50	
42	Kipas Angin	20	9 rusak ringan, 2 rusak berat
43	Exhause Fan	2	
44	Televisi	9	
45	Tape Recorder	2	
46	Loudspeaker	12	
47	Sound System	2	
48	Karaoke	1	
49	Megaphone	1	1 rusak ringan
50	Microphone	24	7 rusak ringan, 4 rusak berat
51	Microphone Table Stand	6	
52	Stabilisator	2	
53	Camera Video	2	
54	Lambang Garuda Pancasila	8	8 rusak ringan
55	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3	3 rusak ringan
56	Aquarium	1	1 rusak ringan
57	Tiang Bendera	6	6 rusak ringan
58	Mimbar/Podium	1	
59	Palu Sidang	3	2 rusak ringan
60	Lambang Instansi	1	
61	Vertikal Blind	1	
62	Asbak Tinggi	4	
63	Bracket Standing Peralatan	1	
64	Audio Mixing Console	1	
65	Audio Phone In	17	11 rusak ringan, 1 rusak berat
66	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	



67	LCD Monitor	3	
68	Camera Conference	2	
69	Telephone (PABX)	4	2 rusak ringan, 1 rusak berat
70	Facsimile	2	
71	Alat Kedokteran THT Lainnya	2	
72	PC Workstation	1	
73	Komputer Jaringan Lainnya	2	
74	P.C Unit	48	
75	Lap Top	23	
76	Scanner	17	
77	CPU (Peralatan Personal Komputer)	20	3 rusak ringan
78	Monitor	8	3 rusak ringan
79	Printer	46	2 rusak ringan, 1 rusak berat
80	External/ Portable Hardisk	5	
81	Server	4	
82	Router	1	
83	Hub	2	
84	Rak Server	2	
85	CAT 6 Cable	1	
86	Acces Point	4	
87	Peralatan Jaringan Lainnya	46	
88	Genset Isuzu 68,6 KVA	1	
89	Jaringan Listrik Lainnya	1	
90	Monografi	20	
91	Referensi	5	

Tabel 4.12 Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

## E. Hibah dan Pengadaan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Tulungagung telah menerima hibah barang dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana serta mendapatkan transfer masuk aset, diantaranya:

- 1) Hibah Barang
  - 1 unit AC
  - 1 unit Printer
- 2) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
  - 1 unit Mobile File
  - 3 unit AC



- 3) Transfer Masuk Aset dari Dirjen Badilum
  - 4 unit Scanner
  - 2 unit Printer

### 4.3 Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan kebutuhan atau alat bantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Pengadilan Negeri Tulungagung telah berusaha melangkah menuju modernisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat disertai dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan internal dalam pengelolaan seperti menguasai dan mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Adapun dukungan teknologi informasi untuk kelancaran tugas di Pengadilan Negeri Tulungagung, telah didukung oleh sebagai berikut:

❖ Dukungan Perangkat Keras (*hardware*)

- Server
- PC
- Laptop
- Printer
- Scanner
- UPS
- Router
- Switch Hub
- CCTV 16 channel
- Perangkat wifi
- Jaringan LAN

❖ Dukungan Perangkat Lunak (*software*)

- Website Pengadilan Negeri Tulungagung

Link: [www.pn-tulungagung.go.id](http://www.pn-tulungagung.go.id)

Pengadilan Negeri Tulungagung sudah memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu pada undang undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Link: <http://sipp.pn-tulungagung.go.id/>



Aplikasi yang dikembangkan Mahkamah Agung RI dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik berkaitan dengan informasi perkara.

- e-Court

Link: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

e-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di e-Court.

- e-Berpadu

Link: <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas pidana antar Penegak Hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

- KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

Link: <https://komdanas.mahkamahagung.go.id/>

Aplikasi yang digunakan untuk pelaporan pada bagian Kepegawaian, Umum Keuangan, dan Perencanaan.

- SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)

Link: <https://sikep.mahkamahagung.go.id/>

Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*). Fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai.

- si SUPER

Link: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>

Untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Tulungagung secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna



layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ *Surveillance*) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP.

- SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)

Link: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

SIWAS merupakan situs online *whistleblowing system* sebagai pelaksanaan Peraturan MA (PERMA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. SIWAS diharapkan dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum. Fitur SIWAS ini untuk menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun internal pengadilan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), panitera, jurusita dan pegawai pengadilan.

#### **A. Implementasi e-Court**

E-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam pendaftaran perkara online melalui e-Court, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan. Layanan aplikasi e-Court terdiri dari:

##### 1) Pendaftaran Perkara (*e-Filling*)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

##### 2) Taksiran panjar biaya (*e-Skum*)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.



3) Mendapatkan nomor perkara

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

4) Pembayaran panjar biaya perkara online (*e-Payment*)

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini Bank telah ditunjuk menyediakan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Tulungagung melakukan kerjasama dengan Bank BRI Cabang Tulungagung.

5) Pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak dari Jurusita maupun Jurusita Pengganti melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

6) Persidangan secara elektronik (e-Litigasi)

Layanan ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik.

7) Putusan secara elektronik

Layanan ini memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi e-Court.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 10 Juni 2021 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Sejak terbitnya Surat Edaran tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung menerbitkan SK KPN Nomor W14-U26/47/HM.02.3/1/2023 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-Court pada Pengadilan Negeri Tulungagung tertanggal 2 Januari 2023. Dengan adanya peraturan tersebut, Pengadilan Negeri Tulungagung segera menindaklanjuti dengan membuka Meja Layanan e-Court serta melakukan pendaftaran perkara perdata melalui e-Court dan tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual.

Pada tahun 2024 seluruh pendaftaran perkara perdata telah dilakukan melalui e-Court. Pada tahun 2024 perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Tulungagung sebanyak 691 perkara dan seluruhnya didaftarkan melalui e-Court.

Adapun Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

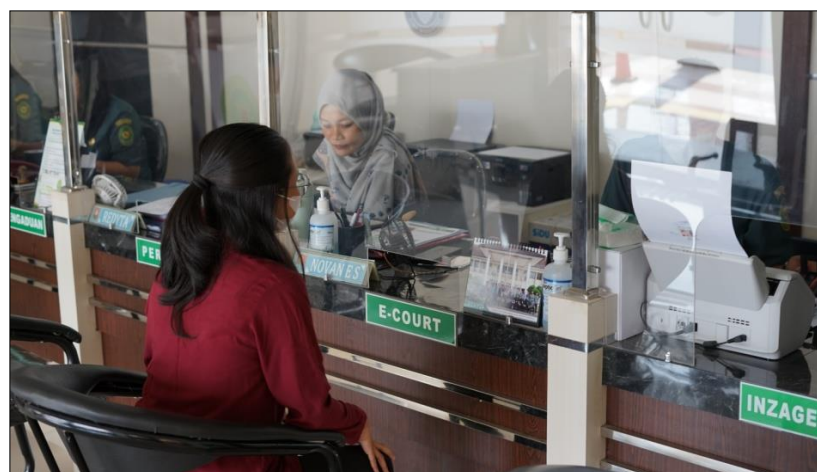
NAMA SATUAN KERJA	Jumlah Perkara Daftar Online					Bayar (Rp)	SKUM (Rp)
	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
Pengadilan Negeri Tulungagung	96	532	1	62	691	271.606.000	271.606.000

Tabel 4.13 Implementasi e-Court Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui e-Court. Beberapa hal yang dilakukan, diantaranya menyediakan:

1) Meja Layanan e-Court

Meja Layanan e-Court merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung untuk membantu Advokat dan pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran e-Court. Pada Meja Layanan e-Court PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung dilengkapi dengan fasilitas seperti PC dan Printer sekaligus Scanner.



Gambar 4.1 Meja Layanan e-Court Pengadilan Negeri Tulungagung

## 2) Buku saku e-Court

Buku saku e-Court berisikan persyaratan dan tata cara pendaftaran perkara perdata secara elektronik melalui e-Court.

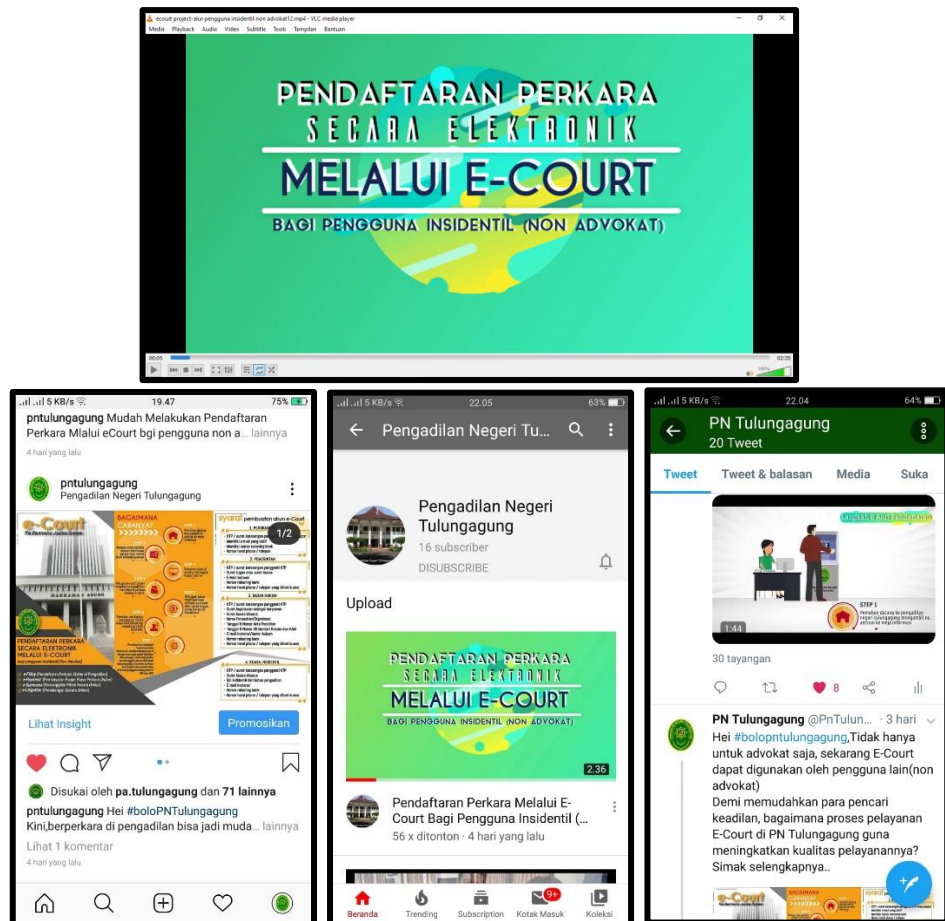


Gambar 4.2 Buku saku e-Court Pengadilan Negeri Tulungagung

## 3) Videografis e-Court

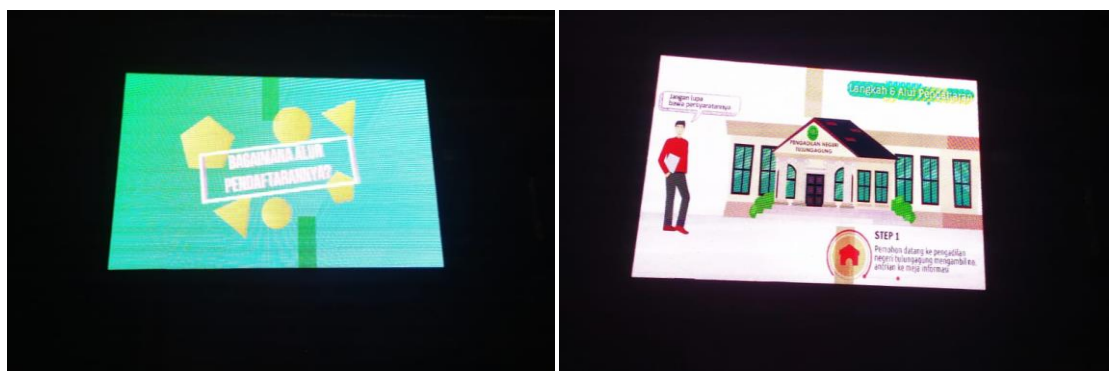
Videografis e-Court bagi Pengguna Insidentil berisi informasi berupa tampilan animasi menarik dan yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik, alur dan prosedur pendaftaran, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat/pengguna. Dengan adanya videografis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tata cara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi e-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tulungagung khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat).

Dalam era digitalisasi ini, informasi yang diberikan mengikuti perkembangan jaman dimana informasi tidak hanya dapat di akses secara *offline*, namun dapat di akses secara *online*, baik via media sosial Instagram, Twitter dan Youtube *channel* Pengadilan Negeri Tulungagung, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan untuk berperkara secara elektronik.



Gambar 4.3 Informasi e-Court pada media sosial Pengadilan Negeri Tulungagung

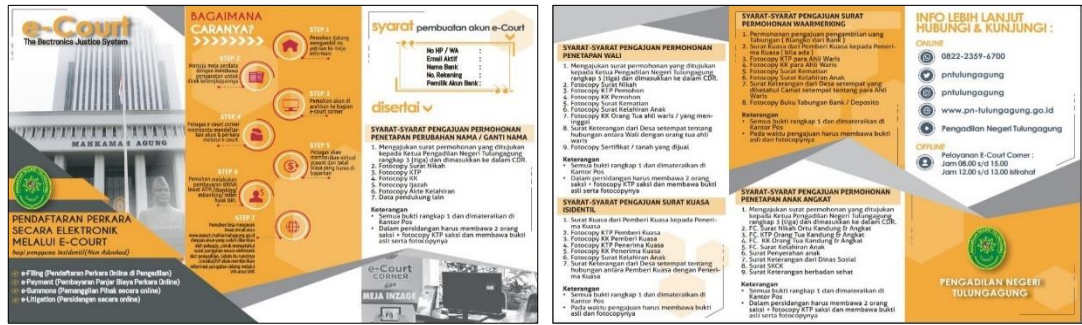
Pengadilan Negeri Tulungagung juga telah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung untuk menampilkan videografis e-Court pada videotron yang ada di GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung.



Gambar 4.4 Informasi e-Court pada videotron GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung

#### 4) Leaflet e-Court

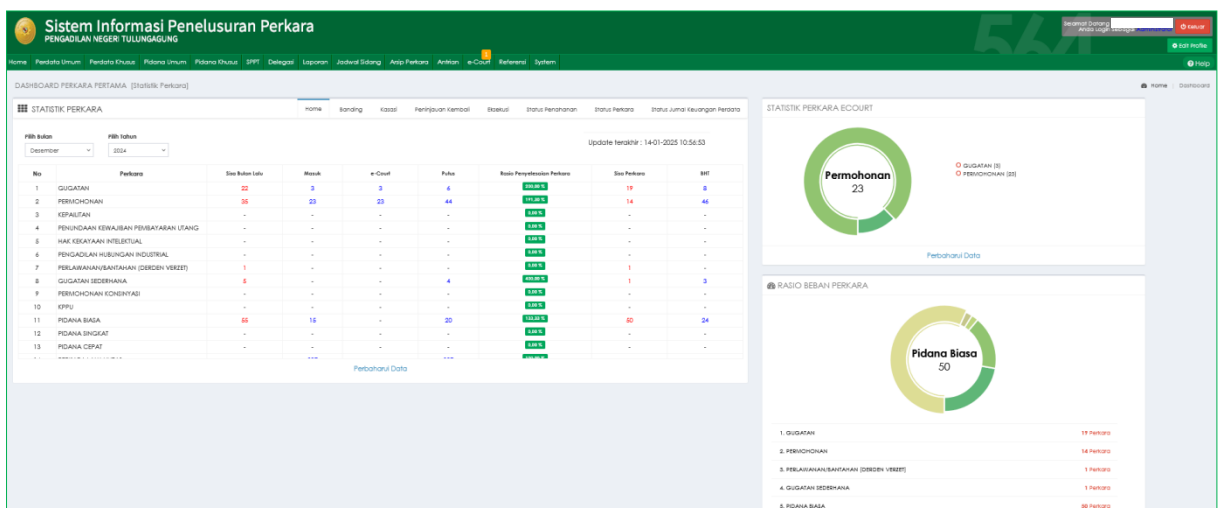
Leaflet e-Court dibuat untuk memberikan fasilitas berupa brosur bagi pengguna yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Tulungagung dan bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi. Leaflet e-Court berisi informasi yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-Court, alur dan prosedur pendaftaran, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat/ pengguna.



Gambar 4.5 Leaflet e-Court Pengadilan Negeri Tulungagung

## B. Implementasi SIPP

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan aplikasi yang dikembangkan Mahkamah Agung RI dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik berkaitan dengan informasi perkara. Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.



Gambar 4.6 SIPP Pengadilan Negeri Tulungagung



Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATUAN KERJA	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2023	MASUK	MINUTASI	SISA TAHUN 2024	PERSENTASE PENANGANAN PERKARA (%)
Pengadilan Negeri Tulungagung	Pidana	49	834	833	50	94,34%
	Perdata	49	691	705	35	95,27%

Tabel 4.14 Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

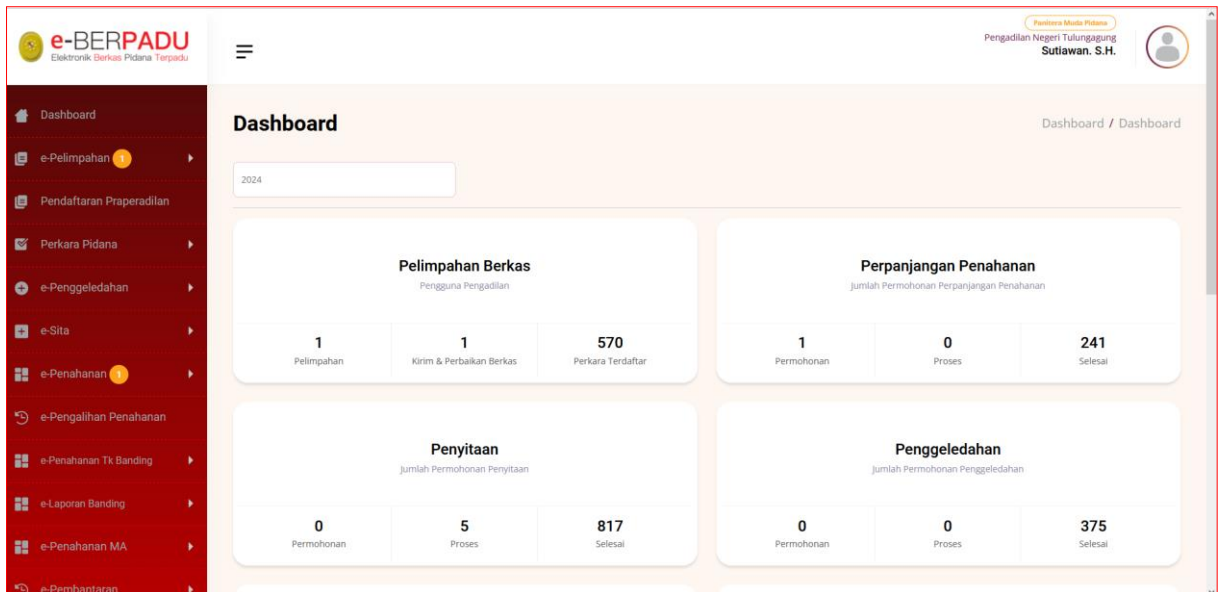
Pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri Tulungagung diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung RI yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Hingga saat ini Pengadilan Negeri Tulungagung telah menerapkan SIPP versi 5.6.4 yang telah terintegrasi dengan SIPP pada Pengadilan Tinggi Surabaya maupun dengan Mahkamah Agung dengan kondisi data yang telah disinkronkan setiap harinya. Ketersediaan perangkat untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri Tulungagung, diantaranya:

- 1) Sudah memiliki server SIPP;
- 2) Sudah memiliki jaringan Internet dan LAN;
- 3) Desk info sudah ada;
- 4) Sudah memiliki ruangan server yang dilengkapi dengan AC;
- 5) Sudah memiliki Rak Server; serta
- 6) Sudah tersedia ruang Teleconference sebagai sarana persidangan online.

### C. Implementasi e-Berpadu

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu).

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas pidana antar Penegak Hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.



Gambar 4.7 Aplikasi e-Berpadu Pengadilan Negeri Tulungagung

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tulungagung telah menerapkan aplikasi e-Berpadu dalam perkara pidana. Adapun data perkara pidana yang melalui e-Berpadu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1.	Pelimpahan Perkara Pidana	268
2.	Pendaftaran Praperadilan	0
3.	Penggeledahan	178
4.	Penyitaan	387
5.	Perpanjangan Penahanan	118
6.	Pengalihan Penahanan	0
7.	Penahanan Tk. Banding	27
8.	Laporan Banding	18
9.	Perpanjangan Penahanan MA	0
10.	Permohonan Pembantaran	0
11.	Penangguhan	0
12.	Diversi	8
13.	Izin Besuk Tahanan	2
14.	Izin Keluar Tahanan	0
15.	Izin Pinjam Pakai	12
16.	Permohonan Pindah Tempat Sidang	0

Tabel 4.15 Data Perkara Pidana e-Berpadu Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2024

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Tulungagung terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang diraih Pengadilan Negeri Tulungagung yang merupakan hasil komitmen dan kerja keras seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung dan dengan menjaga integritas untuk tidak melakukan korupsi, tidak menerima gratifikasi dan pungli.

Dengan menyandang predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Pengadilan Negeri Tulungagung akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 5.1 Piagam Penghargaan WBK dari Kemenpan RB

Pengadilan Negeri Tulungagung juga mendapatkan beberapa apresiasi dalam bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024, diantaranya:

1.



Piagam Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Surabaya atas Peringkat ke-2 Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dengan jumlah perkara 1001 s.d 2000 periode bulan Januari – November 2024.

2.



Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan IKPA Terbaik Semester I Tahun 2024 Kategori Pagu DIPA diatas 5 miliar s.d. 10 miliar rupiah.

## 5.1 Akreditasi Penjaminan Mutu

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.

Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E*) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document Sistem*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pengadilan Negeri Tulungagung, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Tulungagung ini dilakukan penilaian kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sampai dengan yang terakhir telah dilaksanakan penilaian mandiri dan *audit surveillance* pada bulan Oktober tahun 2023 oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pada Tahun 2024, berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, telah dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

Tujuan dari sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.

Pada Tahun 2024, Pengadilan Negeri Tulungagung mendapatkan Predikat “Utama” dengan nilai 806,61 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK.OT.01.3/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II Tahun 2024.

## 5.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Negeri Tulungagung telah membangun Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019, dimana PTSP ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.



Gambar 5.2 PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung



Jenis Meja Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung, diantaranya:

- 1) Meja Layanan Informasi
- 2) Meja Layanan Pidana
- 3) Meja Layanan Perdata
- 4) Meja Layanan Hukum
- 5) Meja Layanan Umum dan Persuratan
- 6) Meja Layanan e-Court

Dalam rangka pengembangan pelayanan bagi masyarakat, Pengadilan Negeri Tulungagung menetapkan organisasi dan juga inovasi terkait standar pelayanan, seperti aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Aplikasi PTSP+ adalah sebuah instrumen Pengadilan Negeri sebagai bentuk kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kegiatan pendaftaran surat masuk dan keluar, buku tamu, permohonan surat keterangan, permohonan penyitaan dan penggeledahan. Staf Pengadilan/ Petugas PTSP akan menghemat waktu dalam melakukan pembuatan dokumen atau pemberian informasi kepada masyarakat. Fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP+ antara lain:

1. Register Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Register Buku Tamu
3. Register Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
  - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
  - Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
  - Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
4. Register Penyitaan
5. Register Penggeledahan

Pengadilan Negeri Tulungagung dalam berinovasi terkait standar pelayanan, juga mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalamnya seperti pembuatan SK tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tulungagung yaitu SK KPN Nomor W14-U26/932/ HM.02.3/VI/ 2023 tanggal 12 Juni 2023.

**PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG KELAS I A**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**  
**NOMOR : W14-L26/932/PM.02.30/2023**  
**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG,**

Menimbang :

- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terprediksi perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan
- bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pelayanan administrasi yang terintegrasi tersebut perlu ditunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan
- bahwa untuk mengintensifkan kinerja pelayanan, pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut maka perlu adanya penyempurnaan pada struktur pengelola PTSP;
- bahwa Struktur, Tugas dan Tanggung Jawab PTSP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Bab II Nomor : 3239/SJUSK/PM02.3/11/2019 Perubahan Nomor : 77/DJUI/SK/PM02.3/2/2018;

Mengingat :

- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemertanian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesejahteraan Peradilan;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- SK KMA RI Nomor 2-144/KMA/SK/VI/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Lampiran 1 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung  
 Nomor : W14-L26/932/PM.02.30/2023  
 Tanggal : 12 Juni 2023

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Cyrella Nur Endah S. S.H. M.H. NIP. 19691028 199603 2 002	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2	Anak Agung Gde Oka M. S.H. NIP. 19780601 200312 1 001	Hakim	Pengawas PTSP
3	Raden Agusdiono, S.H. M.H. NIP. 19650909 199603 1 001	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
4	Gatot Parmujianto, S.H. NIP. 19710925 199303 1 001	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
5	Endro Asmono, S.H. M.H. NIP. 19750207 200112 1 004	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab PTSP
6	Dwi Suryaning Rahayu, S.H. NIP. 19640204 198302 2 001	Panitera Muda Perdata	Penanggungjawab PTSP
7	Sukarinah, SH NIP. 19641117 198503 2 001	Pit Panitera Muda Pidana	Penanggungjawab PTSP
8	Wulansari, S.H. NIP. 19820130 200912 2 004	Pit Kasubag Umum & Keuangan	Penanggungjawab PTSP
9	Yunika Magdalena BR. S. A. Md. NIP. 19990625 202203 2 008	Pengelola Perkara	Peugas Pelayanan Kepaniteraan Pidana
10	Redya Angelica Julya P. I. S.H. NIP. 19970717 202012 2 012	Analisa Perkara Peradilan	Peugas Pelayanan Kepaniteraan Perdata
11	Titik Erawati, S.H. NIP. 198104190201405 2 001	Jurusita Pengganti	Peugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum
12	Nanda Febrina Zamhariz, S. Pd	PPNPN	Peugas Pelayanan Bagian Umum dan Keuangan

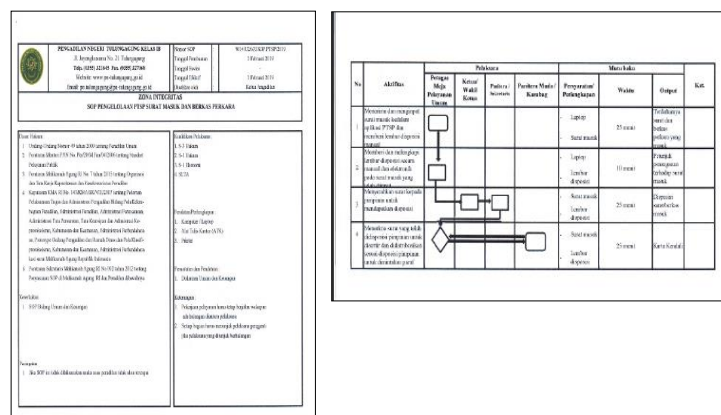
Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung,  
  
 CYRELLA NUR ENDAH SULISTYANNINGRUM.

Gambar 5.3 SK PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung

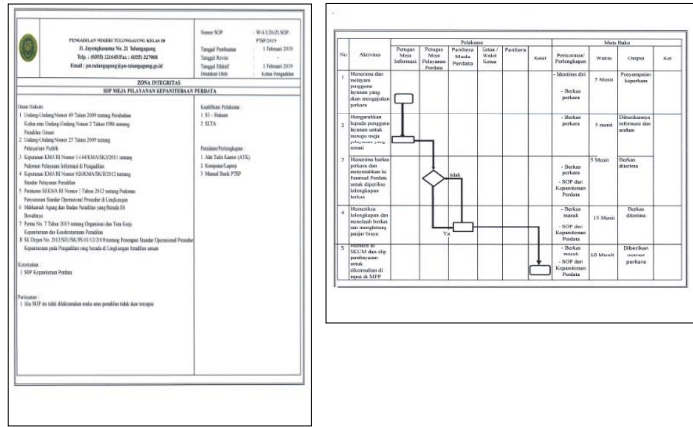
Selain itu, Pengadilan Negeri Tulungagung telah memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya dengan membuat SOP pelaksanaan standar pelayanan.



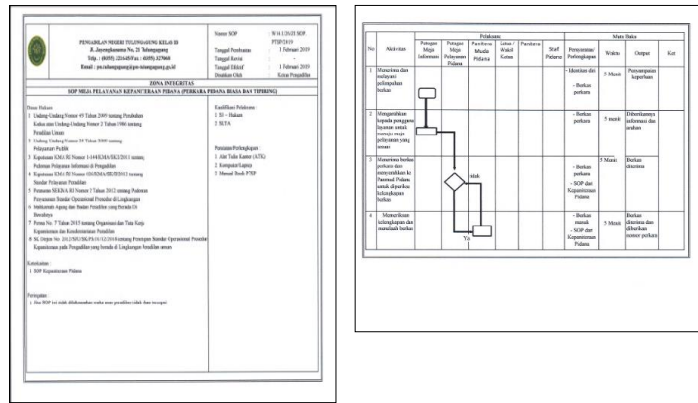
Gambar 5.4 Maklumat Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung



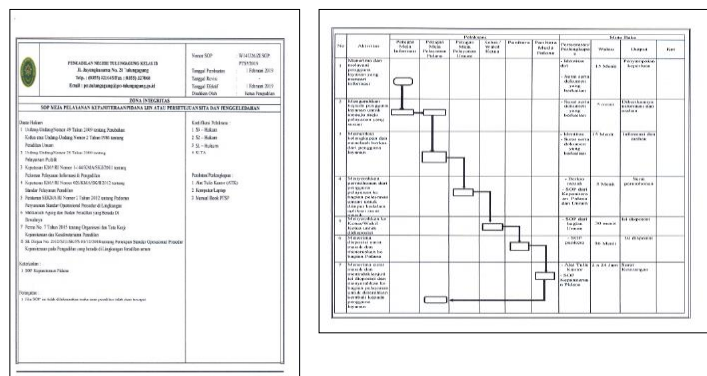
Gambar 5.5 SOP PTSP Pengelolaan Surat Masuk dan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung



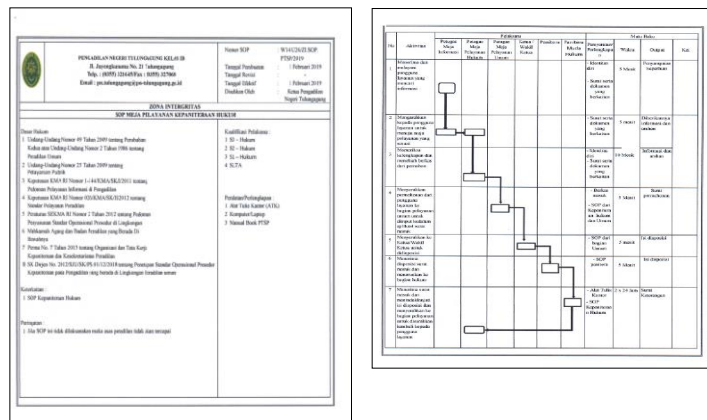
Gambar 5.6 SOP PTSP Meja Pelayanan Keaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tulungagung



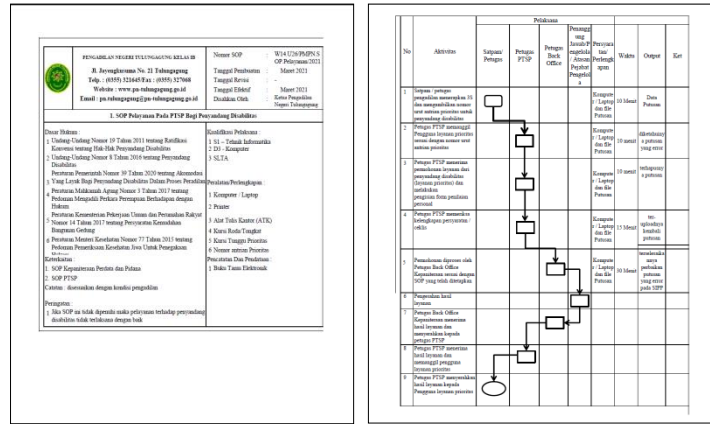
Gambar 5.7 SOP PTSP Meja Pelayanan Keaniteraan Pidana (Tipiring) Pengadilan Negeri Tulungagung



Gambar 5.8 SOP PTSP Meja Pelayanan Keaniteraan Pidana (Sita & Geledah) Pengadilan Negeri Tulungagung



Gambar 5.9 SOP PTSP Meja Pelayanan Keaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung



Gambar 5.10 SOP PTSP Pelayanan Bagi Disabilitas Pengadilan Negeri Tulungagung

Adapun tugas dan tanggung jawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tulungagung pada masing-masing bidang, antara lain:

1. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana bertugas melayani:
  - a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
  - b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;
  - c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
  - d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  - e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
  - f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan;
  - g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelepasan barang bukti;
  - h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
  - i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
  - j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk;
  - k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan; dan
  - l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.
  
2. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata bertugas melayani:
  - a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa;
  - b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
  - c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
  - d. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek;
  - e. Menerima Pendaftaran perkara permohonan;



- f. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  - g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  - h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
  - i. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama;
  - j. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
  - k. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
  - l. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi;
  - m. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi;
  - n. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
  - o. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi; dan
  - p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.
3. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani:
- a. Permohonan pendaftaran pendirian CV;
  - b. Permohonan *waarmaking* surat-surat;
  - c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
  - d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
  - e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - f. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
  - g. Permohonan legalisasi surat;
  - h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022;
  - i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
  - j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
  - k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI; dan
  - l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
4. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas:
- a. Menerima surat-surat dari Pos dan masyarakat umum; dan
  - b. Menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna layanan pengadilan di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung memiliki beberapa fasilitas pendukung PTSP dan fasilitas layanan disabilitas, antara lain:



❖ Fasilitas Pendukung PTSP

- Meja Layanan
- PC Petugas Layanan
- Printer
- Scanner
- CCTV
- Mesin Antrian
- Komputer Survei IKM
- Komputer Aplikasi Form Peralon
- Ruang Tunggu
- Area Bermain Anak
- TV Informasi Posbakum
- TV Informasi Layanan Pengadilan
- TV Informasi Jadwal Sidang
- TV Informasi Panggilan Sidang
- Ruang Poliklinik/ Ruang Menyusui
- *Charging Station*
- Toilet Pengunjung

❖ Fasilitas Layanan Disabilitas

- Komputer Pengguna Disabilitas (dilengkapi pembaca layar)
- Ruang Tunggu Disabilitas
- Alat Bantu Mobilitas (Kursi Roda, Kruk, Tongkat Netra)
- Kartu Antrian Prioritas
- Parkir Khusus Disabilitas
- Toilet Khusus Disabilitas
- *Guiding Block* dan *Warning Block*
- Jalur Landai/ Bidang Miring
- Ruang Sidang Ramah Disabilitas
- Buku Pelayanan *Braille*

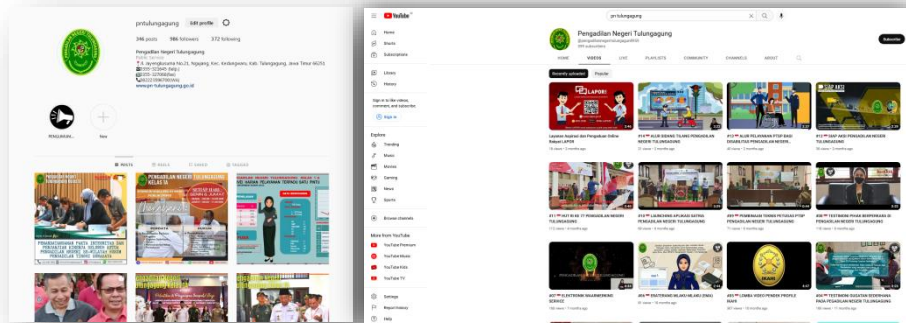
### 5.3 Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Tulungagung dalam melakukan pelayanan, terus berupaya untuk melakukan terobosan dengan mengembangkan inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk inovasi yang telah diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yaitu:

## A. Inovasi Layanan untuk Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan

### 1) Media Sosial Pengadilan Negeri Tulungagung

Media Sosial Pengadilan Negeri Tulungagung diantaranya Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter yang mana Pengadilan Negeri Tulungagung aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat baik itu informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Tulungagung maupun kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Tulungagung.



Gambar 5.11 Instagram dan Youtube Pengadilan Negeri Tulungagung

### 2) Nomor Whatsapp Pengaduan dan Informasi

Nomor Whatsapp Pengaduan dan Informasi dapat digunakan oleh masyarakat khususnya yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Tulungagung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait informasi layanan Pengadilan atau dapat memberikan saran dan masukan kepada Pengadilan Negeri Tulungagung.

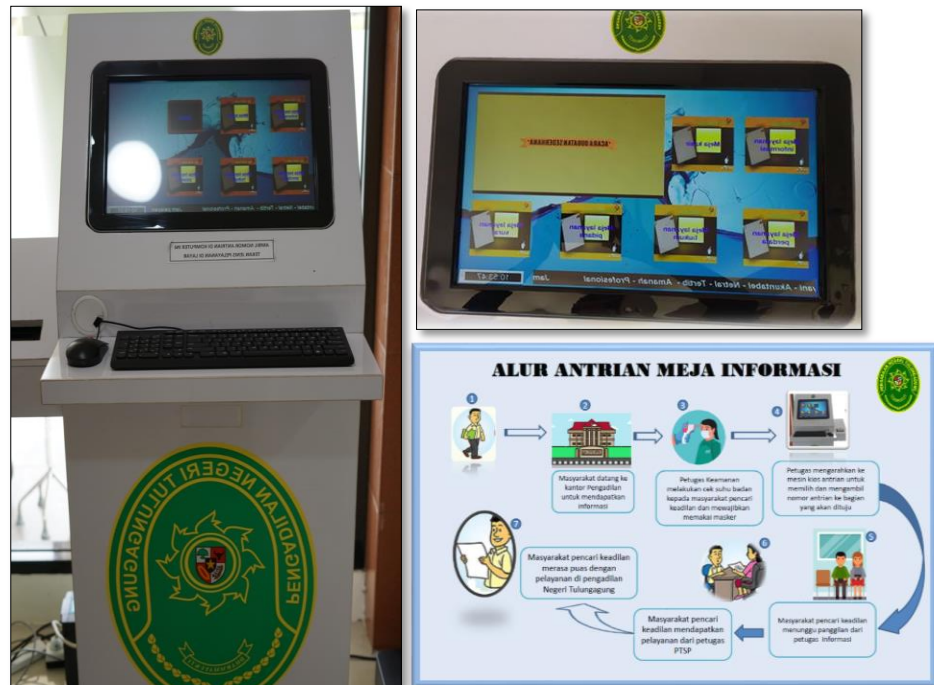


Gambar 5.12 Nomor Whatsapp Pengadilan Negeri Tulungagung

### 3) Antrian PTSP

Antrian PTSP adalah aplikasi antrian bagi pengunjung pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja layanan hukum, layanan perdata, layanan pidana dan layanan umum persuratan. Dengan adanya

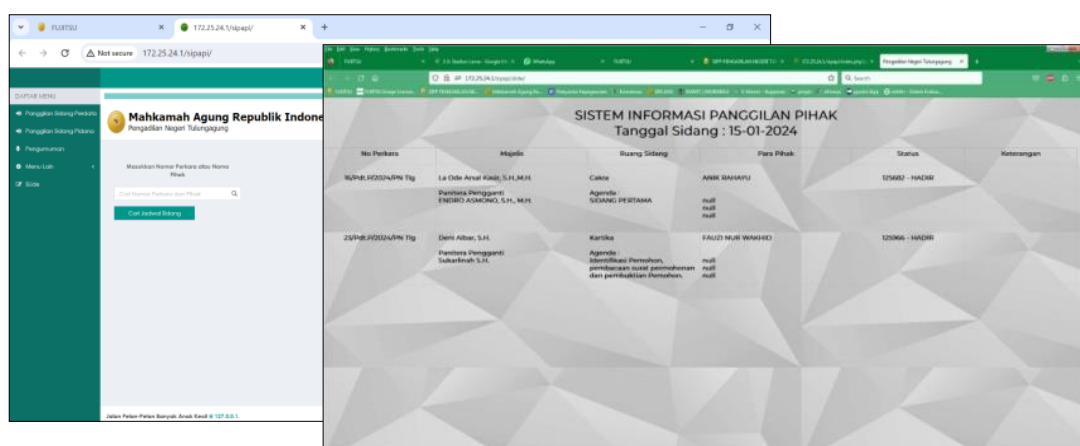
aplikasi antrian PTSP ini dapat mempermudah pengunjung untuk mengantri sesuai nomor antrian tersebut.



Gambar 5.13 Mesin Antrian PTSP Pengadilan Negeri Tulungagung

#### 4) SIPAPI (Sistem Informasi Para Pihak)

Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, salah satunya dengan mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan dapat berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.



Gambar 5.14 Aplikasi SIPAPI Pengadilan Negeri Tulungagung

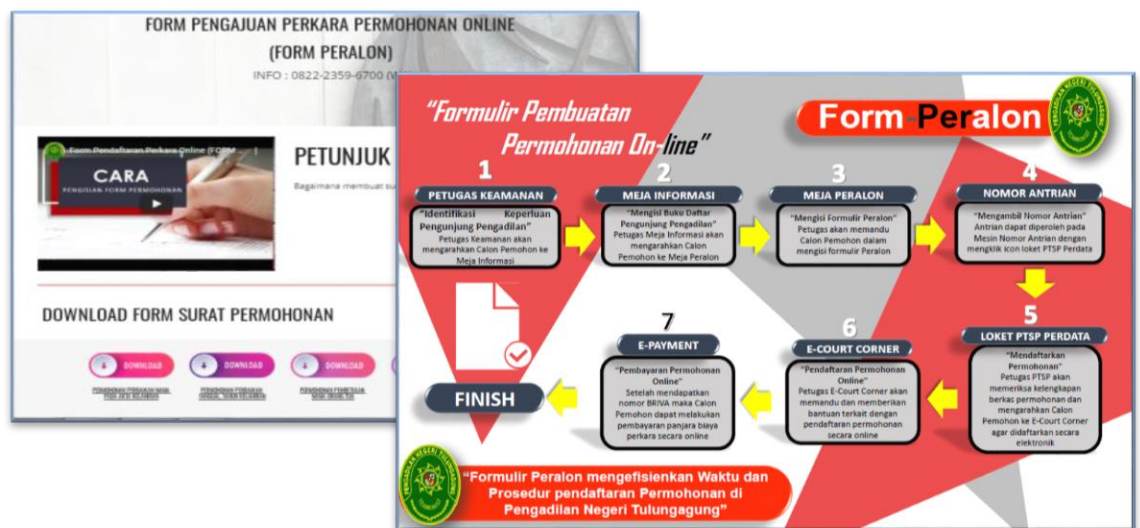
Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan gilirannya untuk bersidang.

## 5) Form Peralon (Formulir Pengajuan Perkara Online)

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Tulungagung khususnya kepada Para Pemohon Pengajuan Perkara Perdata Khususnya untuk Perkara Permohonan, serta untuk mendukung pembagunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan inovasi yang diberi nama Form Peralon (Formulir Pengajuan Perkara Online). Form Peralon merupakan aplikasi yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung bagi Para Pemohon yang akan mengajukan surat permohonan antara lain:

- Permohonan Perbaikan Nama Pada Akte Kelahiran
- Permohonan Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
- Permohonan Pembetulan Nama Orang Tua
- Permohonan Perbaikan Identitas
- Permohonan Perubahan Nama

Sehingga dalam mengajukan surat permohonan tersebut Para Pemohon dapat mengisi aplikasi tersebut dari tempat masing-masing atau pun dari Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang telah disediakan fasilitas computer khusus untuk aplikasi Form Peralon. Aplikasi Form Peralon dapat diakses melalui url dengan alamat [bit.ly/form-peralon](http://bit.ly/form-peralon).



Gambar 5.15 Aplikasi Form Peralon Pengadilan Negeri Tulungagung

## 6) SIAP AKSI (Sistem Aplikasi Akta Catatan Sipil)

Aplikasi SIAP AKSI (Sistem Aplikasi Akta Catatan Sipil) merupakan hasil kerjasama Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan salinan penetapan

secara online, dan mempercepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung dalam pelayanan terkait perbaikan maupun perubahan data kependudukan.



Gambar 5.16 Aplikasi SIAP AKSI Pengadilan Negeri Tulungagung

## 7) Eraterang Mlaku-mlaku (EMA)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam penerbitan Surat Keterangan untuk persyaratan pengajuan Calon Perangkat Desa, Pemohon Surat Keterangan di wilayah Desa, dapat mengajukan secara langsung ke Kantor Desa setempat dan mendapatkan Surat Keterangan pada saat pelaksanaan inovasi Program EMA (Elektronik Surat Keterangan Mlaku Mlaku) tersebut berlangsung, tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung.

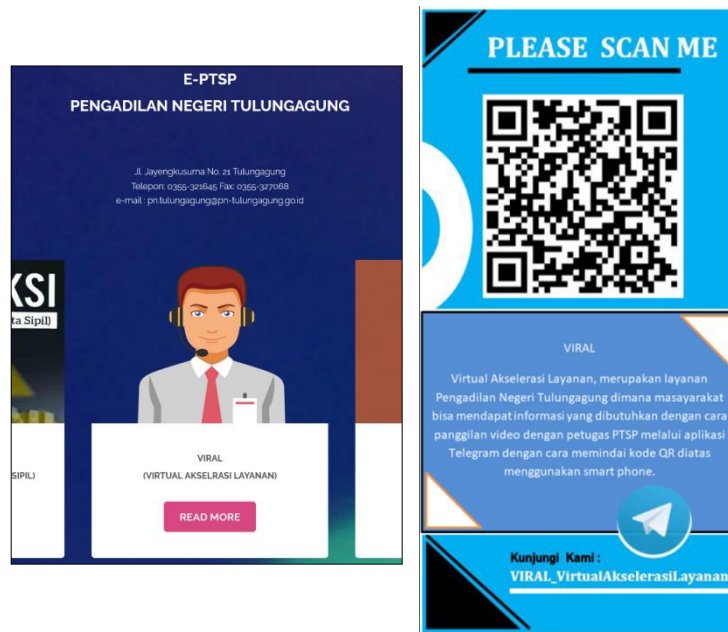
## *eraterang mlaku - mlaku*



Gambar 5.17 Pelaksanaan Inovasi Eraterang Mlaku-mlaku (EMA) Pengadilan Negeri Tulungagung

## 8) VIRAL (Virtual Akselerasi Layanan)

Demi menjawab kebutuhan para pengguna peradilan akan informasi yang cepat dan akurat, Pengadilan Negeri Tulungagung menyediakan layanan virtual yang diberi nama Viral (Virtual Akselerasi Layanan). Viral merupakan layanan dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan panggilan video dengan petugas PTSP melalui aplikasi Telegram dengan cara memindai kode QR pada website menggunakan ponsel atau gadget *smartphone*.



Gambar 5.18 Aplikasi VIRAL Pengadilan Negeri Tulungagung

## 9) E-WAAS (Elektronik Waarmerking Service)

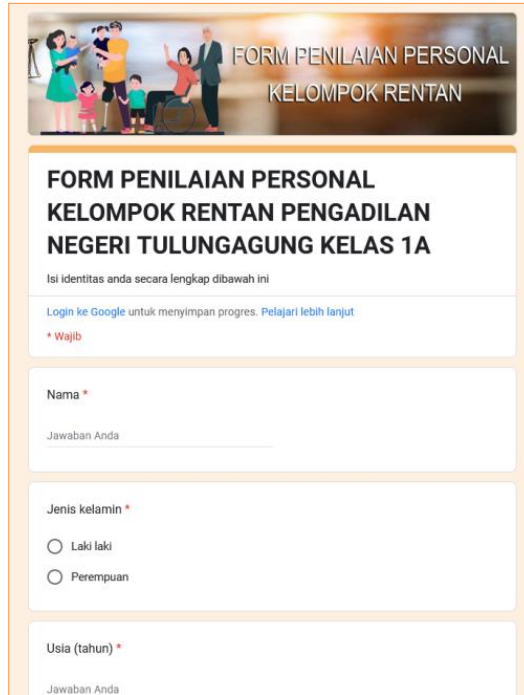
Aplikasi E-WAAS merupakan layanan berbasis digital melalui ponsel atau gadget untuk mempermudah pendaftaran dan pemberian informasi mengenai layanan waarmerking (pengesahan akta dibawah tangan), yang digunakan untuk kebutuhan pengambilan/ penutupan tabungan/ deposito/ asuransi/ surat berharga yang pemiliknya telah meninggal dunia dan diwariskan pada ahli warisnya.



Gambar 5.19 Aplikasi E-WAAS Pengadilan Negeri Tulungagung

#### 10) Form Penilaian Personal Kaum Rentan berbasis Digital

Inovasi dengan cara melakukan digitalisasi terhadap pengisian Form Penilaian Personal Kaum Rentan melalui google form yang dapat mempermudah pengunjung/ pengguna layanan disabilitas dalam pengisian form penilaian personal yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan layanan dan sarana prasarana yang dibutuhkan.



FORM PENILAIAN PERSONAL  
KELOMPOK RENTAN

**FORM PENILAIAN PERSONAL  
KELOMPOK RENTAN PENGADILAN  
NEGERI TULUNGAGUNG KELAS 1A**

Isi identitas anda secara lengkap dibawah ini

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

\* Wajib

Nama \*

Jawaban Anda

Jenis kelamin \*

Laki laki

Perempuan

Usia (tahun) \*

Jawaban Anda

Gambar 5.20 Form Penilaian Personal Digital Pengadilan Negeri Tulungagung

#### 11) MPP Kabupaten Tulungagung

Dengan dibukanya Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Tulungagung atau sekitar taman aloon - aloon Tulungagung oleh Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM., dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Tulungagung turut hadir di Mal Pelayanan Publik pada hari Senin mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB dan Jumat mulai pukul 08.00 - 11.30 WIB.

Pelayanan MPP diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendaftarkan perkara Perdata seperti: Gugatan, Gugatan Sederhana, Verzet, Perlawanan/bantahan dan Permohonan. Untuk informasi pelayanan bagian Hukum seperti: Waarmeking/ Surat Pernyataan Ahli Waris secara online, permohonan Pendaftaran Penolakan Warisan, Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, bisa langsung datang pada hari yang sudah ditentukan.

Gambar 5.21 Layanan Pengadilan Negeri Tulungagung pada MPP Kabupaten Tulungagung

## 12) Sidarling

Dengan adanya program percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan rencana pembangunan jalan tol Kediri – Tulungagung tentu masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik lagi dalam hal kecepatan. Dalam prosesnya, warga terdampak jalan tol membutuhkan sertifikat pertanahan terkait dengan pembebasan lahan, dan syarat untuk diterbitkannya sertifikat tersebut salah satunya membutuhkan akta kematian.

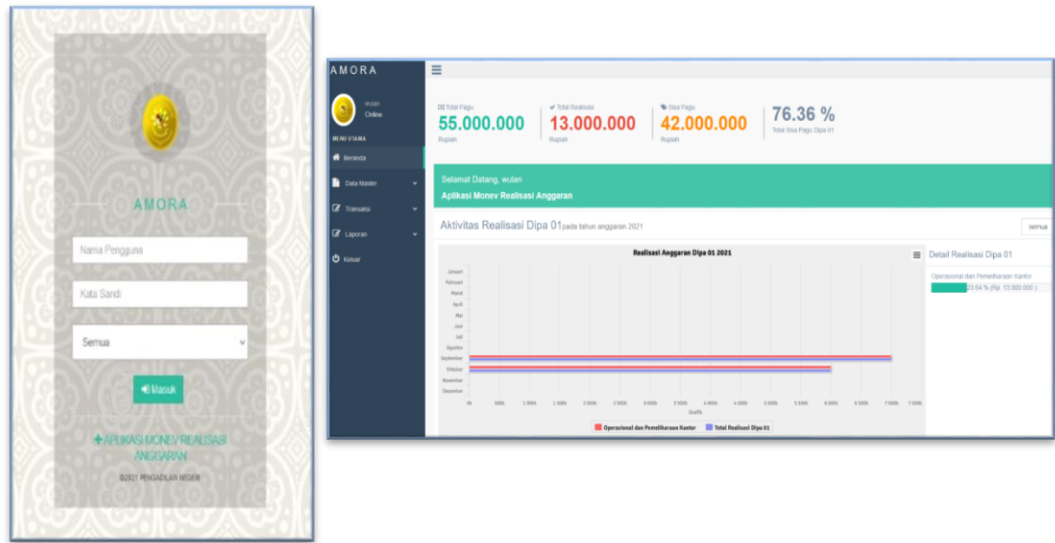
Dalam rangka memperbaiki pelayanan sebagaimana tuntutan masyarakat serta mengatasi permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan berbagai hal terkait dengan kemudahan pelayanan, salah satunya dengan melakukan inovasi membuat program Sidarling (Sidang Permohonan Keliling) yang memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan penetapan akte kematian yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Gambar 5.22 Pelaksanaan Inovasi Sidarling Pengadilan Negeri Tulungagung

## B. Inovasi Layanan untuk Pihak Intern Pengadilan

### 1) AMORA (Aplikasi Monitoring Realisasi Anggaran)

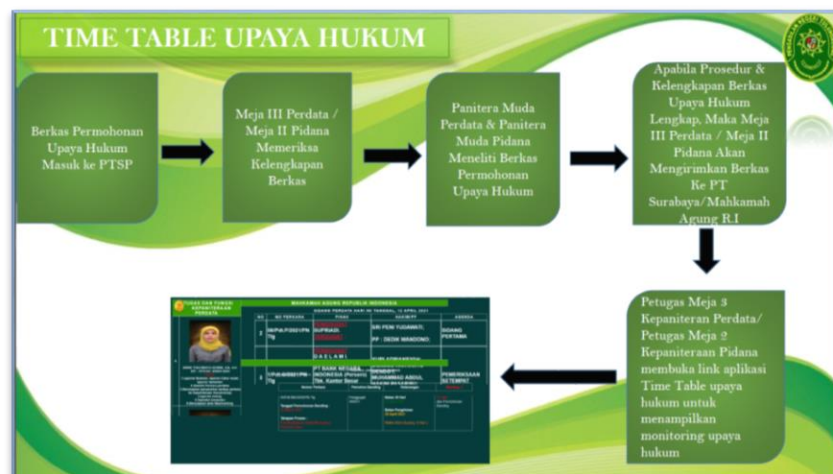
Monitoring Realisasi Anggaran dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi, capaian kegiatan, sisa anggaran dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, Sekretaris dan Bagian Umum dan Keuangan.



Gambar 5.23 Aplikasi AMORA Pengadilan Negeri Tulungagung

### 2) Time Table dan Notifikasi Upaya Hukum

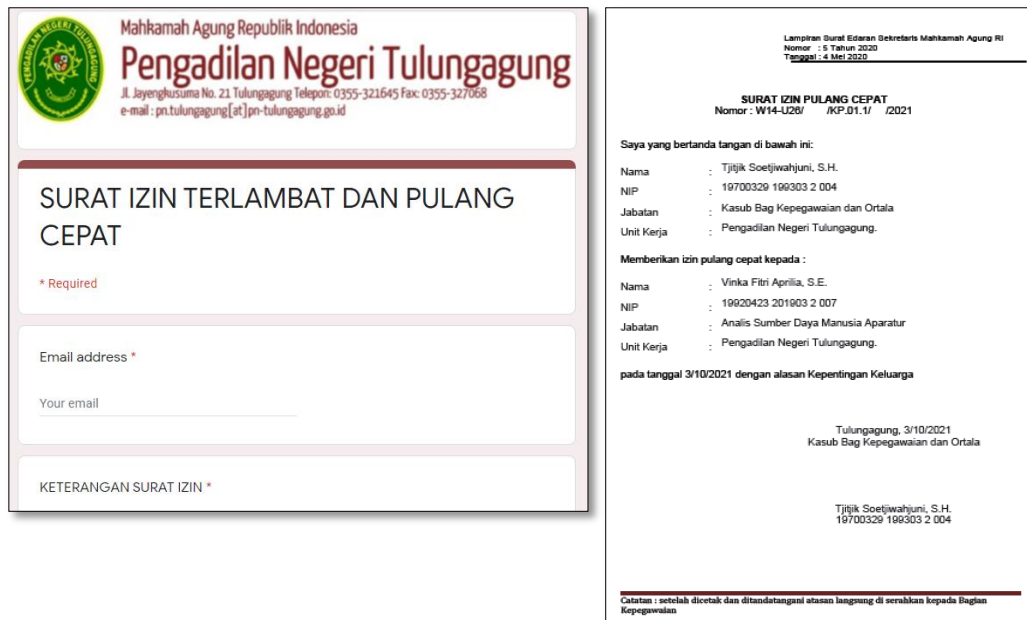
Aplikasi ini disediakan bagi Kepaniteraan Perdata dan Pidana bertujuan untuk meminimalisir keterlambatan Pengiriman Berkas Upaya Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Tulungagung baik untuk perkara Pidana maupun Perkara Perdata dan untuk memonitoring perpanjangan penahanan perkara yang masih berjalan. Upaya hukum yang dapat diajukan diantaranya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Sebagai pengingat adanya pengajuan upaya hukum, Pengadilan Negeri Tulungagung menyediakan aplikasi mandiri untuk monitoring upaya hukum dan kelengkapan datanya melalui Time Table Upaya Hukum.



Gambar 5.24 Aplikasi Time Table dan Notifikasi Upaya Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung

### 3) IKAN PATIN (Izin Keluar Kantor Pulang Cepat dan Datang Terlambat Online)

Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai dalam hal pembuatan surat izin dan memonitoring kedisiplinan Pegawai dengan lebih efektif dan efisien.



Gambar 5.25 Aplikasi IKAN PATIN Pengadilan Negeri Tulungagung

### 4) SIMPUL DASI (Sistem Pengumpulan Data SAKIP)

Merupakan aplikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengumpulan data dari masing-masing bagian sebagai bahan dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tulungagung.



Gambar 5.26 Aplikasi SIMPUL DASI Pengadilan Negeri Tulungagung



## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **6.1 Internal**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pengawasan dilaksanakan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku Aparat Pengadilan, dan kinerja pelayanan publik Pengadilan. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan yang berada di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Tulungagung terhadap pejabat peradilan, keuangan dan material. Ruang Lingkup Pengawasan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial peradilan. Sedangkan sasaran pengawasan adalah Aparat Pengadilan Negeri.

Bentuk Pengawasan ada 2 (dua) yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan penilaian atas laporan atau isi dokumen. Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri meliputi:

- a) Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.
- b) Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.
- c) Pengawasan terhadap Penanganan Pengaduan yang meliputi pengawasan terhadap tingkah laku Aparat Lembaga Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.



## 6.2 Evaluasi

Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Tulungagung dilakukan dengan tujuan untuk memonitor dan mengawasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Diharapkan agar kekurangan atau kesalahan yang ada dapat ditanggulangi dengan cepat. Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024 telah melakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang yaitu dengan:

- a) Melaksanakan rapat pengawasan setiap bulan dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat rutin bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Tulungagung;
- b) Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa masing – masing bidang sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan; dan
- c) Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan terkait pengawasan eksternal baik dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Pada umumnya Pengadilan Negeri Tulungagung telah melaksanakan tugas dengan baik selama tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan, dan dibuktikan pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Tulungagung mendapatkan penghargaan. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

1. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Tulungagung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya; dan
4. Pengadilan Negeri Tulungagung berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasi keterbukaan informasi di pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Tulungagung mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.





## 7.2 Rekomendasi

Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tulungagung antara lain:

### 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Masih terdapat kesenjangan SDM antara formasi kebutuhan ideal dengan kebutuhan riil. Hal tersebut mengakibatkan jumlah Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Tulungagung masih sangat jauh dari ideal, sehingga banyak pegawai di Pengadilan Negeri Tulungagung yang menduduki jabatan tidak melaksanakan tugas secara murni melainkan ada tugas tambahan atau diperbantukan, ditahun depan pegawai yang batas usia pensiun sebanyak 1 pegawai (Panitera Muda Hukum). Selain itu sampai dengan 31 Desember 2024 Jabatan Panitera Muda Perdata kosong, jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung sebanyak 9 orang Hakim termasuk Wakil Ketua. Hal tersebut sangat kurang jika dibandingkan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Tulungagung sebanyak 1.525 perkara.

### 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Pada Pengadilan Negeri Tulungagung masih sangat diperlukan pemenuhan penyedia sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

### 3. Kurangnya Anggaran

Pada Pengadilan Negeri Tulungagung masih sangat diperlukan pemenuhan anggaran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan diantaranya:

- Anggaran pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri Tulungagung;
- Anggaran pemeliharaan halaman kantor Pengadilan Negeri Tulungagung; dan
- Anggaran pemeliharaan Kendaraan dinas roda-4.

Untuk mengatasi kendala pada Pengadilan Negeri Tulungagung maka diperlukan :

1. Penambahan Hakim dan ASN sesuai dengan beban tugas Pengadilan Negeri Tulungagung dengan memperhatikan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja yang setiap awal tahun diusulkan;
2. Pemenuhan penyedia sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman;





3. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Negeri Tulungagung hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi, dana pemeliharaan untuk pengembangan IT tersebut agar lebih diperhatikan; dan
4. Penambahan anggaran untuk anggaran pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri Tulungagung, pemeliharaan halaman kantor dan pemeliharaan Kendaraan dinas roda-4.

Tulungagung, 15 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh, Ketua, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum	
--	---	--

